**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Bencana merupakan hal yang tidak bisa diprediksi manusia kapan pun dan dimana pun terjadi, bencana alam merupakan konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor dan aktivitas manusia. Bencana dapat menimbulkan kerugian besar seperti kerusakan alam, kerugian material juga dapat mengakibatkan kematian. Bencana tidak bisa di hiraukan atau di anggap remeh, bahkan pada negara-negara maju, simulasi bencana kerap dilaksanakan agar masyarakat dapat mengatasi atau menanggulangi bencana tersebut, seperti Jepang yang memperkenalkan rumah simulasi gempa kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi agar masyarakat tidak gagap akan peristiwa bencana yang menimpanya, yakni gempa yang secara frekuentif terjadi. Oleh sebab itu, Pemerintah memiliki peran penting dalam mengolah, mengatasi dan menanggulangi kemungkinan bencana yang terjadi pada negara, kesigapan dalam penanggulangan bencana pemerintah harus siap akan segala hal yang mungkin terjadi dalam meminimalisir kerugian dan keselamatan masyarakat.

Perencanaan tata kelola kota dan pemeliharaan infrastruktur publik merupakan inti dalam menciptakan kota dan masyarakat yang tangguh di mana resiko bencana dapat berkurang. Pada abad ke-21, kita akan diperlihatkan pada realita bahwa urbanisasi semakin cepat dan kita perlu menjadi lebih pintar dalam merencanakan perubahan yang cepat di kota-kota untuk menghindari resiko dalam pengambilan keputusan yang buruk dan abai pada praktik yang baik dalam perencanaan kota. Ada sekitar satu miliar orang yang tinggal di lingkungan perkotaan di seluruh dunia dan ini adalah faktor penggerak utama resiko pada peristiwa cuaca ekstrim yang didorong oleh perubahan iklim.

Pengurangan resiko dalam dampak tata kelola perkotaan memberikan peluang untuk investasi modal melalui pengembangan dan peningkatan infrastruktur untuk efisiensi dan penghematan energi, renovasi dan pembaruan perkotaan, energi yang lebih bersih, dan pengatasan permukiman kumuh. Pemerintah daerah adalah tingkat kelembagaan yang paling dekat dengan warga dan masyarakat. Mereka memainkan peran pertama dalam menanggapi krisis dan keadaan darurat dan dalam memenuhi kebutuhan konstituen mereka. Mereka memberikan layanan penting kepada warganya, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, air dan sebagainya, yang perlu dibentuk agar siap terhadap bencana.

Indonesia dilihat dari kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis karena Indonesia berada di garis lintang 6° LU – 11° LS sedangkan garis bujurnya adalah 95° BT – 141° BT juga berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta berada di antara dua samudera yaitu samudera hindia dan samudera pasifik**.**

Indonesia merupakan negeri yang memiliki karateristik geografis rawan bencana. Terletak di wilayah cincin api dunia, Indonesia sangat rawan diguncang gempa bumi hingga gelombang tsunami. Gunung-gunung berapi yang terdapat di hampir semua pulau juga menambah rentetan kemungkinan terjadinya bencana vulkanologimaka itu kesigapan pemerintah dalam penanggulangan bencana harus menjadi tugas utama. Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2008 dibuatlah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menanggulangi bencana, juga realisasi Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. BNPB mempunyai tugas memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara, serta mempunyai fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif yakni tepat sasaran dan efisien yakni rasio antara *input* dan *output* sesuai; dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Penanggulangan bencana juga dilakukan secara desentralisasi di mana dalam pasal 18 di dalam Undang–Undang Nomor 24 tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kotamadya. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diinginkan agar kesigapan pemerintah dalam menanggulangi bencana lebih cepat pada sasaran peristiwa bencana itu terjadi.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dipimpin oleh Kepala yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, serta dibantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok menetapkan pedoman dan pengarahan, standarisasi dan prosedur tetap, menyusun dan menetapkan serta mengelola sistem data dan informasi kebencanaan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber lainnya yang sah dan melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, juga mempunyai fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BPBD Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh BPBD yang tersebar diberbagai kota dan kabupaten sekitarnya. Hal ini ditujukan, penerapan tugas dan penanggulangan bencana mampu dilakukan dengan cepat tanggap dengan koordinasi antara BPBD pusat dan BPBD yang tersebar pada beberapa wilayah. Saalah satunya BPBD Kabupaten Bandung yang menjadi fokus penelitian.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum didalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Terletak di komplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM.17 Soreang Kabupaten Bandung.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

Tahun 2018 merupakan tahun pembangunan bagi Bandung dan sekitarnya, maraknya perkembangan infrastruktur yang dapat langsung dinikmati oleh masyarakat bukan berarti tidak memiliki cacat prosedur. Pembangunan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun pihak Swasta masih abai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Namun demikian, dalam implementasinya, KLHS belum mampu menjawab persoalan lingkungan. Pembangunan yang dilakukan bahkan oleh pemerintah sendiri pun, tampak tidak memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penyusunan KLHS selama ini dianggap sebagai pelengkap administrasi semata, penyusunannya dilakukan untuk menjalankan perintah Undang-Undang, tanpa benar-benar menjawab substansi persoalan lingkungan yang dapat menjadi penyebabnya bencana yang kerap terjadi belakangan ini.

Hal tersebut menjadi evaluasi bagi masyarakat maupun pemerintah bahwa bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Bandung tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah, namun juga melibatkan ulah manusia yang kerap menantang lingkungan. Bencana yang tidak dapat dihindari tentunya menjadi fokus bersama untuk diminimalisir dan/atau ditanggulangi, terlebih oleh BPBD yang memiliki peran penting pada hal ini.

Tugas dan fungsi merupakan acuan sebuah organisasi dalam menjalankan pekerjaannya untuk mencapai tujuan bersama. Tugas merupakan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi tersebut dan fungsi merupakan perwujudan tugas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Dalam setiap organisasi pemerintahan, tugas dan fungsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan organisasi tersebut. Penetapan tugas dan fungsi atas suatu unit organisasi menjadi landasan hukum unit organisasi tersebut dalam beraktivitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di lapangan.

Pembagian tugas dan fungsi dalam penanganan bencana agar cepat dan tangkas juga menjadi salah satu konsentrasi BPBD, bagaimana setiap bidang melakukan penyusunan program yang saling terintegritas antar satu bidang dengan bidang lainnya sebagai susunan rencana kerja yang terus berjalan dari tahun ke tahun. Pentingnya program kerja suatu bidang tidak terlepas dari pencapaian tujuan organisasi tersebut. Program kerja merupakan cara yang disahkan untuk mencapai tujuan dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan  demi tercapainya  kegiatan pelaksanaan  karena  dalam  program  tersebut  telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan atau dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri dapat tercapai (Jones : 1994).

Indikasi rencana program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, maka SKPD BPBD perlu melakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif, yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan SKPD BPBD dalam penyusunan rencana strategis SKPD BPBD dan dapat memberikan arah pembangunan dalam periode 2016-2021.

Seiring dengan berjalannya program dan kegiatan di Tahun Anggaran 2017, berdasarkan hasil evaluasi internal BPBD Kabupaten Bandung melakukan review atas kegiatan yang sedang berjalan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), dan dari hasil *review* telah terumuskan program dan kegiatan yang rencana akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2018, adapun program dan kegiatan tersebut yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, Proogram Penanganan Darurat Kebencanaan, dan Program Perbaikan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana. Dalam penelitian ini, Peneliti memilih Program Penanganan Darurat Kebencanaan sebagai tajuk utama penerapan implementasi kebijakan.

Program Penanganan Darurat Kebencanaan yang di canangkan BPBD Kab. Bandung merupakan salah satu program yang bernilai vital dalam penerapan tugas pokok dan fungsi BPBD. Program tersebut menjadi penentu kesigapan BPBD dalam menanggulangi bencana yang terjadi di Kabupaten Bandung. Program ini dilaksanakan sebagai langkah pertama dalam penanggapan terjadinya bencana untuk meminimalisir jumlah korban dan kerusakan yang disebabkan oleh bencana itu sendiri. Dalam penerapannya, Kabupaten Bandung memiliki wilayah yang dianggap menjadi “langganan” bencana setiap kali cuaca tidak bersahabat seperti turunnya hujan yang terus menerus, wilayah tersebut adalah Rancaekek, Soreang dan Baleendah, di mana banjir kerap terjadi. Lalu bagaimana Program Penanganan Darurat Kebencanaan berperan dalam pemecahan masalah tersebut?

Kesuksesan berlangsungnya sebuah program ditentukan oleh pengkonstruksian program tersebut sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga mendapat timbal balik berupa penilaian dari masyarakat atau publik program itu ditujukan. Hal tersebut berkaitan dengan elemen-elemen yang terdapat dalam kelompok yang mencanangkan program, kelompok tersebut berperan sebagai subjek serta objek yang berpengaruh bagi konstruksi program tersebut. Sebagai subjek, BPBD bertanggung jawab atas komunikasi yang terjalin pada tahap penyusunan program, segala upaya, cara dan teknik penyampaian gagasan terhadap konstruksi program kepada pihak yang menjalankan serta publik sasaran program tersebut agar dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam program. Sebagai objek, struktur birokrasi serta koordinasi dengan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan program dinilai memiliki andil yang besar dalam kesuksesan program tersebut. Kedua unsur tersebut dinilai sangat penting mengingat vitalitas program Penanganan Darurat Kebencanaan yang bersifat genting.

Kabupaten Bandung terletak di Cekungan Bandung dengan ciri khas dataran luas di bagian tengah yang dikelilingi pegunungan di sebelah barat, selatan, utara dan timurnya. Sungai Citarum yang berhulu di Gunung Wayang mengalir di kawasan ini sebelum masuk ke waduk Saguling. Sebagian besar kota-kota Kecamatan padat penduduk di Kabupaten ini seperti Majalaya, Soreang, Banjaran, Rancaekek, Dayeuhkolot, Margahayu, Cileunyi, Baleendah, Bojongsoang dan lain-lain terletak di dataran ini. Kawasan ini juga selalu dihantui banjir yang melanda setiap musim hujan dikarenakan aliran kali yang ada di seluruh Cekungan Bandung bermuara ke sungai Citarum ditambah drainase yang buruk, pencemaran sungai yang parah serta dangkalnya sungai. Adapun wilayah yang terletak di Pegunungan yaitu Ciwidey, Pangalengan di selatan serta Cimenyan dan Cilengkrang di bagian utara yang jika dilihat dari peta seolah terpisah dari wilayah utama Kabupaten Bandung karena terhalang Kota Bandung. Gunung yang ada di Kabupaten Bandung antara lain: Gunung Patuha (2.334 m), Gunung Malabar (2.321 m), Gunung Papandayan (2.262 m), dan Gunung Manglayang.

Ditinjau dari kondisi wilayah, Kabupaten Bandung merupakan daerah yang rentan terjadi bencana. Menurut catatan LKIP BPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 korban jiwa akibat bencana di Kabupaten Bandung melibatkan 3.864 kepala keluarga dan 13.463 jiwa dengan rincian 3 orang meninggal dunia 5 orang luka-luka dan 933 jiwa mengungsi. Hal tersebut merupakan tanggungjawab BPBD dalam pelaksanaan Program Penanganan Kedaruratan Bencana. Pada penelitian ini, Peneliti akan melakukan studi kasus di Rancaekek, Kab. Bandung.

Rancaekek merupakan wilayah yang memiliki luas 4.329,50 hektare;/43,295 km2 dengan jumlah penduduk 160.435 jiwa yang terbagi dalam 13 desa dan 1 kelurahan. Potensi bencana yang dialami Rancaekek dapat dibilang cukup tinggi, terutama ketika hujan terus menerus turun, banjir yang kerap terjadi sepanjang Jalan Raya Rancaekek km. 6 menjadi penghambat masyarakat dalam melakukan kegiatan. Dampak yang disebabkan oleh banjir pun tidak sebatas sarana umum dan perumahan yang rusak, namun juga kelumpuhan jalan raya yang merugikan para pengemudi kendaraan dan transportasi umum. Terlebih, di awal tahun 2019 kemarin, tepatnya tanggal 12 Januari, Rancaekek dilanda bencana berupa angin puting beliung yang menyebabkan rusaknya 738 pemukiman warga yang dihuni 753 KK dengan jumlah 2567 jiwa. Hal tersebut merupakan konsen BPBD dalam menghalau bencana yang tidak dapat diprediksi seperti angin puting beliung di mana BPBD harus bekerja secara taktis, efektif dan efisien dalam mengemban tugas yang menentukan nasib masyarakat dan daerah terdampak bencana.

Aparatur BPBD Kabupaten Bandung beserta pihak lain yang terlibat dalam membantu pelaksanaan Program Penanganan Darurat Kebencanaan tersebut tentu harus siap dan sigap dalam menghadapi bencana, potensi bencana susulan, kurangnya Sumber Daya BPBD Kabupaten Bandung berbanding dengan warga terdampak bencana yang berjumlah lebih banyak dari personil yang turun ke lapangan. Pada tahap inilah efektivitas dan efisiensi program dinilai, bagaimana pihak BPBD mampu menangani warga terdampak bencana yang terbilang masif. Hal tersebut tentunya mengandalkan Aparat atau Sumber Daya Manusia yang kapabel dalam melaksanakan tugas penanganan bencana. Kegiatan evakuasi, penyaluran bantuan terhadap warga, serta rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh pihak BPBD akan mendapat penilaian dari warga terdampak bencana sebagai subjek sasaran program. Bagaimana pihak BPBD menjalankan tugasnya sekaligus melakukan komunikasi, bagaimana pesan mampu ditransmisikan dengan baik kepada pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan program menjadi konsentrasi dalam implementasi kebijakan Program Darurat Kebencanaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memilih judul “Implementasi Kebijakan Program Penanganan Kedaruratan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Penanganan Darurat Kebencanaan di Kecamatan Rancaekek)” untuk meninjau sejauh mana fokus implementasi kebijakan program tersebut.

* 1. **Fokus Penelitian**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peran penting dalam menyikapi, meminimalisir dan menanggulangi potensi dan/atau dampak bencana. Maka, pelaksanaan kebijakan program BPBD menjadi fokus utama dalam kinerjanya, implementasi kebijakan program kerja merupakan salah satu acuan tercapainya tujuan instansi. Hal tersebut menjadi fokus penelitian mengingat pentingnya penanganan bencana tersebut terhadap korban dan wilayah terdampak serta kerugian pasca bencana, hal tersebut memunculkan tanya apakah implementasi kebijakan program tersebut sudah berjalan dengan baik. Dengan pertimbangan tersebut, penulis akan meninjau kembali Implementasi Kebijakan Program Penanganan Darurat Kebencanaan BPBD Kabupaten Bandung sebagai tajuk penulisan skripsi ini

* 1. **Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanganan Darurat Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung?
2. Apa saja yang menjadi kendala implementasi kebijakan Penanganan Darurat Kebencanaan BPBD Kabupaten Bandung?
3. Usaha-usaha apa yang harus dilakukan dalam Penanganan Darurat Kebencanaan BPBD Kabupaten Bandung?
   1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
      1. **Tujuan Penelitian**
4. Menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Penanganan Darurat Kebencanaan BPBD Kabupaten Bandung.
5. Menganalisis kendala yang muncul dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Darurat Kebencanaan BPBD Kabupaten Bandung.
6. Menganalisis usaha-usaha yang dilakukan dalam Penanganan Darurat Kebencanaan BPBD Kabupaten Bandung.
   * 1. **Manfaat Penelitian**
7. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya di Kabupaten Bandung.
8. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi pembaca dan peneliti lain yang mempunyai minat yang sama yaitu untuk mengkaji masalah – masalah yang berhubungan dengan implementasi kebijakan program dari sebuah lembaga / organisasi.

**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI**

* 1. **Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan suatu proses penelaahan atau pengkajian terhadap berbagai literatur atau sumber kepustakaan yang diarahkan untuk menemukan pegangan atau landasan teoritik yang kuat serta memiliki kebenaran yang tinggi. Kajian Pustaka juga menelaah relevansi antara literatur yang dikaji dengan masalah atau fokus penelitian yang akan diteliti. Maka, dalam melakukan kajian pustaka perlu juga diperhatikan tingkat *validitas* dan *realibitas* literatur tersebut, sehingga diharapkan dapat menemukan literatur yang benar-benar berkualitas sesuai fokus penelitian.

**2.1.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

1. Argo Baskoro S. dan Sri Suwitri (2012)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya salah satu kegiatan pemerintah yang berusaha untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatanmelalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin. Tujuan dari program Jamkesmas ini adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatankepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu yang membutuhkanpelayanan kesehatan agar tercapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa daya tanggap dansikap masyarakat terhadap implementasi program Jamkesmas di Kecamatan Banyumanik Semarang. Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Merilee S.Grindle dan Daniel A.Mazmanian dan Sabatier. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatori dengan sample sebanyak 44 responden. Pengujian hipotesis menggunakan rumus Korelasi Rank Kendall dan Konkordasi Kendall. Hasil penelitian ini menunjukan adanya pengaruh positif dan signifikan antara daya tanggap terhadap implementasi program Jamkesmas, pengaruh sikap masyarakat terhadap implementasi program Jamkesmas juga positif dan signifikan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa daya tanggap dan sikap masyarakat mempunyai pengaruh terhadap implementasi program Jamkesmas di Kecamatan Banyumanik Semarang. Diketahui pula dari hasil penelitian bahwa implementasi program Jamkesmas masuk dalam kategori kurang berhasil, karena kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat miskin sebagai target group. Jadi rekomendasi untuk penelitian ini adalah: 1). Meningkatkan kinerja pelaksanaan program Jamkesmas 2). Meningkatkan frekuensi sosialisasi program Jamkesmas 3). Pengarahan berkelanjutan tentang program Jamkesmas.

1. Asna Aneta (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di kota Gorontalo, mengetahui dan menganalisis tingkat responsivitas pemerintah kota Gorontalo dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, mengetahui dan menganalisis tingkat keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan program penanggulangan kemiskinan, dan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telah dilaksanakan sesuai tahapan kebijakan P2KP, responsivitas pemerintah Kota Gorontalo tinggi dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, masyarakat menerima dan mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan P2KP di Kota Gorontalo.

1. Perlindungan Parlindungan (2013)

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Kubu Raya. Deskripsi hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah belum berjalan sesuai harapan karena berdasarkan data kelulusan untuk tingkat ula tahun 2010 hanya 51% dan tahun 2011 berjumlah 56 %, sedangkan untuk tingkat wustha tahun 2010 hanya 34% dan tahun 2011 berjumlah 0.9%. Adapun komposisi guru pada tahun 2012 hanya 25 orang (19,96%) berpendidikan S1 dan 2 orang (0,15%) berpendidikan S2 yang kesemuanya tidak memiliki latar belakang pendidikan umum. Berdasarkan kondisi demikian, perlu diberikan pendidikan dan pelatihan berupa pendampingan agar mereka memiliki pengetahuan mengenai pendidikan umum sehingga mereka akan lebih berkualitas. Terimplementasinya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah adalah : para santri dapat memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun *civil effect* dalam pekerjaan yang mensyaratkan ijazah. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini telah membawa perubahan bagi santri Pondok Pesantren Salafiyah dimana mereka memiliki kesempatan yang sama dengan lulusan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah. Secara lebih umum dapat dinyatakan bahwa, dengan adanya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang diadposi oleh sistem pendidikan di Pondok Pesantren telah membuka kesadaran masyarakat dalam memahami akselerasi antara pendidikan umum dengan pendidikan agama.

1. Susi Stella Anggraeni (2013)

Dalam menciptakan tertib administrasi, pemerintah melalui Kemendagri membuat kebijakan berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden No 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional. Kebijakan yang dibuat adalah Program e-KTP, e-KTP merupakan cara baru pemerintah untuk membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik yang ada didalamnya, maka setiap pemilik e-KTP dapat terhubung kedalam satu database nasional,sehingga setiap penduduk hanya memiliki satu KTP. Pemerintah membuat kebijakan program e-KTP bagi masyarakat, dimaksudkan agar terciptanya tertib administrasi. Selain itu diharapakan agar menghindari hal-hal yang tidak di inginkan,seperti mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu yang selama ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan landasan teori dari Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

1. Kiam Kiam (2014)

Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Non Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kecamatan Sintang. Penyelenggaraan PAUD non formal memiliki manfaat yang tidak sedikit, salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta mengembangkan bakat-bakatnya secara optimal. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) proses implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Sintang (2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Sintang. Penelitian ini di laksanakan di lembaga pendidikan nonformal PAUD yang berada di Kecamatan Sintang pelajaran 2012/2013, yaitu PAUD Insan Mulia, PAUD Taman Ceria dan PAUD Pelita Hati. Sumber penelitian ini adalah guru PAUD di Kecamatan Sintang. Hasil penelitian diketahui, proses implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada PAUD di Kecamatan Sintang belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, yayasan atau organisasi, masih belum sinergis antara pemerintah, pengelola lembaga PAUD dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan kontrol secara bersama, banyak PAUD di Kecamatan belum sesuai dengan kualifikasi sebagai pendidik, dikarenakan minimnya lulusan Sarjana untuk PAUD. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada PAUD di Kabupaten Sintang adalah: Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki kualifikasi, kompetensi harus sesuai dengan standar nasional pendidikan, program dan perencanaan PAUD di Kecamatan Sintang sudah berjalan sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional (permendiknas) RI Nomor 58 tahun 2009, untuk sarana dan prasara masih sangat kurang, pembangunan PAUD melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Agar komunikasi berjalan lancar maka seharusnya ada instansi koordinator seluruh pembangunan PAUD. Supaya proses implementasi kebijakan pendidikan PAUD non formal berjalan lancar, maka beberapa hal dapat diupayakan sebagai berikut: menyekolahkan guru PAUD ke SI PAUD. Masyarakat diharapkan juga terlibat dalam kontrol/pengawasan, penilaian serta dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan PAUD. Memberikan tambahan dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana. Kata kunci: Implementasi, Pendidikan Non Formal, PAUD

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Penulis / Komponen** | **Penulis** | | | | | |
| **Argo Baskoro Sasongko dan Sri Suwitri**  **(2012)** | **Asna Aneta**  **(2012)** | **Perlindungan Parlindungan**  **(2013)** | **Susi Stella Anggreni Frans**  **(2013)** | **Kiam Kiam**  **(2014)** | **M. Sahid Kholki (2018)** |
| Judul Penelitian | Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kecamatan Banyumanik Semarang | Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo | Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pada Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Kubu Raya | Implementasi Kebijakan Program e-KTP di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat | Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Non Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sintang | Implementasi Kebijakan Program Penanganan Darurat Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung |
| Lokasi Penelitian | Kecamatan Banyumanik Semarang | Pemerintah Kota Gorontalo | Pondok Pesantren Salafiyah Di Kabupaten Kubu Raya | Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat | Kecamatan Sintang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung |
| Metode dan Alat Penelitian | Eksplanatori, kuisioner, studi literatur. | Studi kasus, wawancara, Focus Group Discussion (FGD). | Wawancara, studi dokumentasi | Wawancara, studi literatur. | Wawancara, Observasi, studi literatur. | Wawancara, observasi, studi dokumentasi, studi literatur. |
| Kesimpulan Penelitian | Implementasi program Jamkesmas masuk dalam kategori kurang berhasil karena sosialisasi kurang di gencarkan. | Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telah dilaksanakan sesuai tahapan kebijakan P2KP. | pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah belum berjalan sesuai harapan. | Implementasi Kebijakan Program belum cukup berhasil karena beberapa faktor yang terjadi di kecamatan juga masyarakat. | Program dan perencanaan PAUD di Kecamatan Sintang berjalan sesuai peraturan menteri pendidikan nasional (permendiknas) RI Nomor 58 tahun 2009. | Program berjalan ideal di Kecamatan Rancaekek meskipun belum ada penanganan serius untuk bencana banjir, berbagai upaya dilaksanakan untuk meminimalisir faktor-faktor yang menjadi hambatan. |

* + 1. **Pengertian Administrasi**

Menurut Ulbert Silalahi (2003), Administrasi secara sempit didefinisikan

“Sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Pengertian administrasi secara sempit ini lebih dikenal dengan istilah Tata Usaha”.

Sedangkan menurut S.P. Siagian (1973) dalam buku Ulbert Silalahi (2003) Administrasi yaitu proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi ialah suatu proses penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau ditentukan. Administrasi baik dalam pengertian luas maupun sempit di dalam penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Setelah mengetahui pengertian mengenai Administrasi, maka penulis akan menambahkan mengenai pengertian Administrasi Publik menurut Dwight Waldo (1996:17)

1. *Public Administration* adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan – tujuan pemerintah.
2. *Public Administration* adalah suatu seni dan ilmu tentang *management* yang dipergunakan untuk mengatur urusan – urusan negara.

Willoughby dalam Dimock dan Dimock (1986:22) berpendapat bahwa Administrasi Publik adalah fungsi untuk menjalankan hukum dengan sebenarnya seperti dinyatakan oleh badan – badan legislatif dan ditafsirkan oleh badan – badan yudikatif pemerintah. Sedangkan pendapat lain datang dari Leonard D. White dalam Dimock dan Dimock (1986:22) mengemukakan bahwa Administrasi Publik terdiri dari semua tindakan yang ditujukan kepada pelaksana atau pemaksaan kebijakan negara.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa baik Willoughby dan Leonard D. White memaknai administrasi publik sebagai pelaksana atau implementasi hasil dari proses keputusan publik (lembaga legislatif).

**2.1.3 Pengertian Implementasi**

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan public selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.

Bertitik tolak pada latar belakang dan perumusan masalah, peneliti menggunakan kerangka pemikiran yang dapat dijadikan landasan teori berupa pendapat dari para ahli yang menjadi kajian dalam penelitian yakni Implementasi Kebijakan Program Penanganan Darurat Kebencanaan.

Menurut Nurdin Usman (Usman, 2002:70) mengemukakan:

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan bersama.

Pada dasarnya, kebijakan dibuat karena adanya suatu permasalahan, untuk menyelesaikan permasalahan itu harus mengimplementasikan kebijakan dalam bentuk kegiatan dengan mengikuti sesuai prosedur yang ada untuk mencapai suatu tujuan.

Sedangkan menurut Guntur Setiawan (2004) mengemukakan:

Implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan serta tindakan dengan tujuan untuk menggapainya diperlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Implementasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan interaksi atau komunikasi yang saling mempengaruhi, karena tanpa adanya komunikasi, kegiatan untuk mencapai tujuan tidak akan tercapai dan dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak akan berjalan secara optimal.

**2.1.4 Kebijakan**

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn (2000:51-52) menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahsa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan *polis* yang berarti “ negara-kota” dan sansakerta disebut dengan pur yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan *politia* yang berarti negara.

Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan diantaranya, Carl Friedrich dalam Indiahono (2009:18) menyatakan bahwa

“kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi, dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. “

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum. Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan intepretatif. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* serta diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain kebijakan harus memberi peluang di interpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada.

Dalam ruang lingkup pemerintahan kebijakan sering dikaitkan dengan kebijakan publik. Berdasarkan berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Tidak hanya itu. Kebijakan publik kerap pula menyertakan partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan yang terbaik. Namun, tidak jarang kebijakan merupakan hasil 'karya' yang bersifat tertutup. Dalam arti kata lain, kebijakan terjadi pada konteks politik yang tidak demokratik sehingga keputusan sangat bersifat *top-down*. Ini bukan berarti di negara-negara bersistem demokrasi, kebijakan tertutup tidak terjadi. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh para aktor pembuat kebijakan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang bersifat sempit untuk merepresentasikan kepentingan golongan, agama atau kepentingan politik tertentu saja. Akibatnya, kebijakan menjadi tidak bersifat publik lagi, meskipun terkadang harus dilaksanakan secara luas. Ini karena keputusan yang dihasilkan hanya mewadahi kepentingan segelintir orang saja.

Robert Eyestone, misalnya, dalam bukunya *The Threads of Public Policy* (1971:18) mendefinisi kebijakan publik sebagai: "..*the relationship of governmental unit to its environment*." Namun, definisi ini masih terlalu luas untuk dipahami sehingga maknanya menjadi tidak menentu bagi sebagian besar mahasiswa maupun *scholars* yang mempelajarinya. "Hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya," menurut Eyestone di atas dapat meliputi hampir semua elemen dalam konteks negara. Padahal dalam lingkup yang nyata, kebijakan publik tidalk selalu menggambarkan keluasan definisi Eyestone itu.

Definisi lain menjelaskan bahwa kebijakan publik: "...*what governments do, why they do it, and what difference it makes*" (Dye 1992:2). Merujuk definisi tersebut dapatlah disimpulkan kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah, entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumberdaya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya, dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu (*what difference it makes*) Bahkan dalam sudut pandang lain, Dye (1992:2) menulis pula kebijakan publik sebagai: "*Anything a government chooses to do or not to do.*" Menurut takrif ini, semua pilihan-pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu adalah kebijakan publik.

Berbeda dengan Dye, kajian klasik Laswell (1956:4) menyatakan kebijakan publik sebagai: "...*a project program of goals, values, and practices*." Manakala Easton (1965: 212) memaknainya sebagai: *the impact of government activity*." Lebih lajut Easton menjelaskan, kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik. Mereka ialah: birokrat senior (eksekuti), legislatif, para hakim, dan sebagainya" (Easton 1965:214). Dari kedua scholars ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah aktivitas pemerintah yang mempunyai tujuan, memiliki nilai tertentu dan memberikan dampak (positif) bagi masyarakat luas.

Definisi lain ditawarkan oleh Friedrich (1969:79) yang menuliskan kebijakan sebagai:

“*a proposed course of action of a person, group, overnment within given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to tilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose*”

Makna kebijakan sebagai ‘serangkaian tindakan atau kegiatan', ditambahkan Friedrich (1969: 80) sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian terpenting dari definisi kebijakan milik Friedrich. Bagaimanapun juga, kebijakan harus menunjukkan 'apa yang sesungguhnya dikerjakan' daripada 'apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan’ pada suatu masalah.

Definisi lain pernah juga diajukan oleh Eulau & Prewitt (1973: 465) yang menyatakan:

“Kebijakan adalah 'keputusan tetap' yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.”

Usaha untuk mentakrifkan kebijakan publik juga dilakukan oleh William I. Jenkins (1978). Beliau menjelaskan, kebijakan publik:

*“a set of interrelated decision taken by political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decision should, in principle, be within the power of those actors to achieve.”* (Jenkins 1978: 4)

Jenkins memandang kebijakan publik sebagai sebuah proses, tidak seperti Dye (1992) yang menilainya sebagai pilihan pemerintah. Bahkan lebih jelas lagi, Jenkins menyatakan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berhubungan. Dalam kata lain, Jenkins hendak menjelaskan bahwa kebijakan merupakan proses pembuatan keputusan yang komprehensif menyertakan banyak *stakeholders*.

Sementara itu, Anderson (1990: 3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai: *"A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”. Dalam bahasa yang sederhana, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Lebih lanjut menurut Anderson (1990: 3), kebijakan adalah, "... *purposive or goal orientet action rather than random or change behavior* ..." Selain itu, .".., *policy consist of courses or patterns of action by governmental officials rather than their separate discrete decision.*" Dan, ."... *policy is what government actually do in regulating .., not what they intend to do or say they are going to do.*" Pengertian kebijakan Anderson di atas, menurut penulis, setidaknya memperkaya definisi kebijakan yang disampaikan oleh Jenkins (1978).

Pertama, dilihat dari aspek aktor; kebijakan merupakan keputusan yang diambil oleh beberapa aktor pembuat kebijakan. Malah dalam perbincangan buku ini (dalam bab-bab lain buku ini lebih dijelaskan), kebijakan seringkali merupakan hasil dari diskusi panjang para aktor yang melibatkan peran stakeholders. Justru tidak jarang dari para stakeholders inilah kebijakan yang terbaik muncul. Kedua, dilihat dari aspek antara 'aksi kebijakan' dan 'persepsi para pembuat kebijakan.' Dari kedua aspek inilah definisi Anderson menyempurnakan lagi takrif kebijakan yang dibuat oleh Jenkins.

Pada level yang berbeda, Theodoulou (1995: 7) menyatakan kebijakan publik haruslah dapat menyelesaikan atau mendorong beberapa hal seperti:

“...*resolving conflict over scarce resources, regulating behavior, motivating collective action, protecting rights, and directing benefits toward the public interest*”

Dalam kata lain, kebijakan mestinya dapat menyelesaikan konflik atas kelangkaan sumber-sumber daya, mengatur perilaku, melindungi hak-hak dasar, dan lainnya. Ini semua harus dilakukan oleh kebijakan publik, karena inilah tugas penting dari sebuah negara.

**2.1.5 Konsep Implementasi Program**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan Program sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

1. Pengorganisasian

Struktur oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

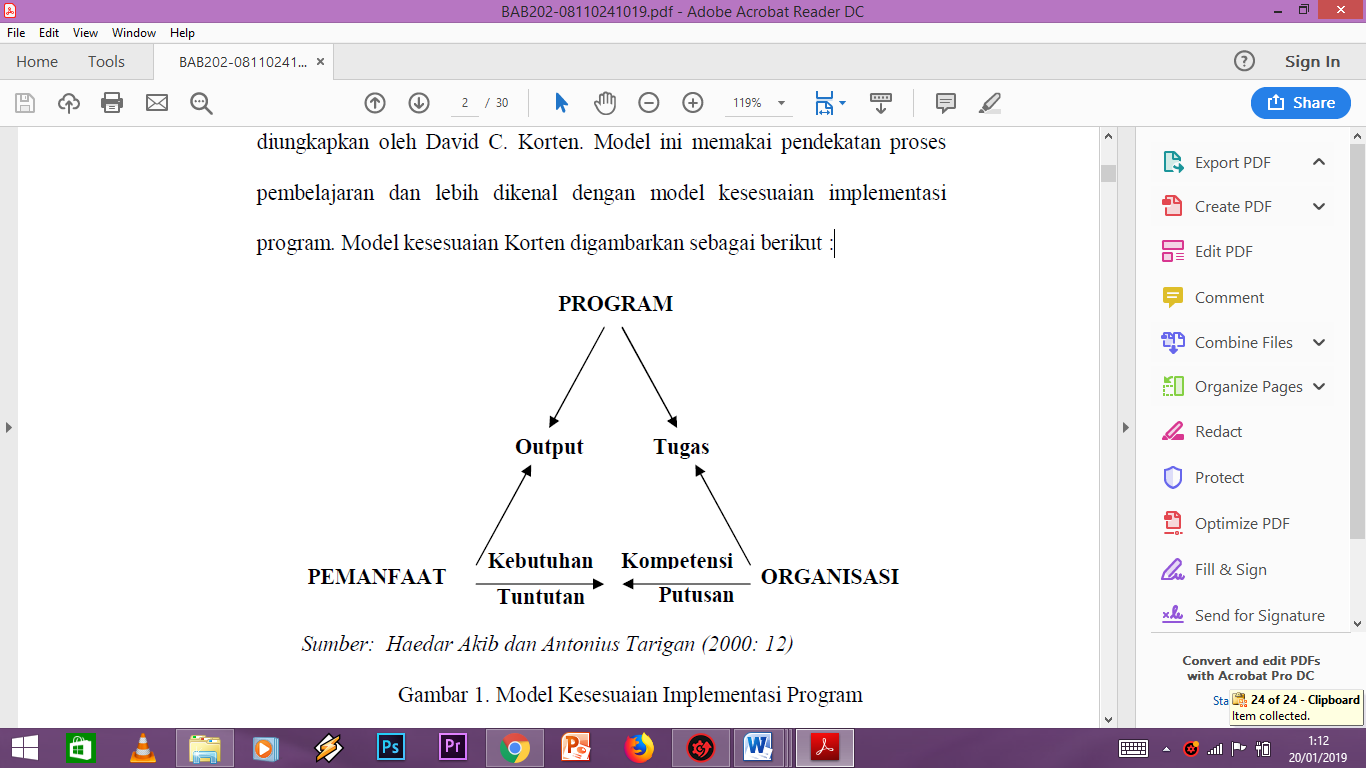
1. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1** Model Kesesuaian Implementasi Program

*Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12)*

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Haedar Akib dan Antonius Tarigan, 2000: 12).

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat

.

**2.1.6 Implementasi Kebijakan**

Menurut Thoha (2008:108) mengemukakan:

“Kebijakan publik mengatur banyak hal mulai dari perilaku, mengorganisasikan birokrasi, mendistribusikan penghargaan sampai penarikan pajak dari masyarakat”.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:139) mendefinisikan:

“Implementasi Kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Sedangkan menurut Edward III (1980:1) dalam buku Iwan Satibi (2011:167) mengemukakan bahwa:

‘*Policy implementations...is the stage of policy making between the establishment of a policy ... and the concequences of the policy for people whom is affects.’*

Bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksana dari suatu program yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan. Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakam suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Kesulitan dalam proses implementasi kebijakan dapat kita lihat dari pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugne Bardach melukiskan kerumitan dalam proses implementasi menyatakan pernyataan sebagai berikut : “Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedenganrannya mengenakan bagi telinga pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”

* + 1. **Model Implementasi Kebijakan menurut para Ahli**

Perkembangan studi implementasi kebijakan telah memasuki generasi ketiga, dimana generasi pertama memperkenalkan pendekatan *top-down.* Pendekatan yang mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan dimulai dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah sehingga pelaksanaannya pun bersifat tersentralisasi. Pendekatan *top-down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh aktor pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh para aparatur, administrator atau birokrat di semua tingkatan terutama pada tingkatan bawah. Fokus analisis implementasi kebijakan pada pendekatan top-down berkisar pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan.

Generasi kedua perkembangan teori implementasi kebijakan memperkenalkan pendekatan *bottom-up* atau dalam istilah Lester & Stewart Jr. (2000:108) dinamakan *the market approach* (pendekatan pasar) sebagai respon atas pendekatan *top-down*. Bahwa untuk menyelesaikan masalah publik sebaiknya dimulai dari “bawah” yang mengenal dan memahami konteks maslaah yang dirasakan oleh mereka.

Generasi ketiga, memperkenalkan pendekatan hibrid atau pendekatan campuran (antara pendekatan *top-down* dengan pendekatan *bottom-up*). Pendekatan ini untuk mengatasi kelemahan konseptual perdebatan dua kutub antara pendukung pendekatan top-down dengan pendukung pendekatan bottom-up. Pendekataan ini juga menumpukan perhatian pada argumen empiris tentang konseptualisasi yang tepat mengenai proses implementasi dan secara pragmatis meramu argumen-argumen ekstrim dari kedua belah pendekatan menjadi model yang mengakui kemudi pusat dan otonomi daerah.

Model-model implementasi kebijakan publik, seperti:

1. Donald Van Metter & Carl Van Horn

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan,
2. Sumber Daya,
3. Karakteristik agen pelaksana,
4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana,
5. Komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
7. George C. Edward III

Model implementasi yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh Edward III dengan menamakan model implementasi kebijakan publik dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation.* Terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi,
2. Sumber Daya,
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi.
5. Marilee S. Gridle

Pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Keberhasilan suatu implementasi kabijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri dari:

1. *Content of Policy*
2. *Context of Policy*
3. Daniel H. Mazmanisn & Paul A. Sabatier

Model implementasi ini disebut dengan *A Frame for Policy Implementation Analysis*. Kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap
2. Tingkat dan Ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.
3. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat.
4. Variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.
5. Thomas R. Dye

Model implementasi kebijakan dari Dye sering disebut juga dengan istilah “Model Implementasi Interaktif”. Model ini menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika program dianggap kurang memenuhi harapan *stakeholders*. Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi program atau kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.

*Input* sumber daya dapat digunakan secara optimum jika dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambilan kebijakan, pelaksanaan kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan yang kondusif.

1. Charles O. Jones

Menurut Jones (1996:296) buku Agustino (2017:154) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni:

1. Organisasi : pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
2. Interpretasi : menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Penerapan : ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.
   * 1. **Faktor Penentu Implementasi Kebijakan**

Kebijakan dapat bersifat membujuk orang supaya bertindak sesuai dengan aturan atau tujuan yang diharapkan oleh kebijakan tersebut termasuk apakah kebijakan tersebut berkenaan dengan penghargaan terhadap hak paten, perizinan untuk membuka lahan guna pembangunan perumahan atau penerimaan anggaran negara.

Implementasi kebijakan dianggap tidak efektif apabila tujuan kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan oleh maksud kebijakan, jika subjek kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan oleh maksud kebijakan, ataupun jika subjek kebijakan berhenti mengerjakan apa yang ditentukan. Ada beberapa hal yang mengakibatkan satu implementasi kebijakan dikatakan efektif atau tidak.

1. Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah.

Kodrat manusia, bila merujuk pada filsafat politik John Locke, dikatakan memiliki *state of nature* yang positif. Ini artinya, manusia dapat menerima dengan baik hubungan relasional antar-individu. Ketika relasi ini berjalan dengan baik, maka logikanya seluruh warga akan saling hormat-menghormati, memberikan respek pada (otoritas) orangtua, memberikan penghargaan yang tinggi pada ilmu dan pengetahuan, menghormati undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, mematuhi aturan hukum, mempercayai pejabat-pejabat pemerintah, mematuhi aturan hukum, mempercai pejabat-pejabat pemerintah dan sebagainya. Kepatuhan-kepatuhan ini akan terus berlangsung selama individu dalam masyarakat tersebut masih menganggap masih cukup banyak alasan dan argumen untuk menghormati kepatuhan-kepatuhan itu. Dalam arti kata lain, memang manusia (secara kodrati) secara moral menyadari bahwa perundnagan dan hukum harus mereka patuhi sebagai suatu hal yang benar dan baik. Dalam hal ini , faktor penentu keefektifan pelaksanaan kebijakan didasarkan atas penghormatan dan penghargaan publik pada pemerintah yang legitimat. Ini merupakan kata kunci penting bagi terwujudnya pemenuhan atas pengejawantahan kebijakan publik. Apabila publik menghormati pemerintah yang berkuasa oleh karena legitimasinya, maka secara otomatis mereka akan turut memenuhi ajakan pemerintah melalui berbagai bentuk kebijakan.

1. Kesadaran untuk menerima kebijakan

Dalam masyarakat yang digerakkan oleh logika rational choices (pilihan-pilihan rasional), banyak dijumpai individu atau kelompok warga yang mau menerima dan melaksanakan kebijakan publik sebagai sesuatu yang logis, rasional serta memang dirasa perlu. Namun, di sisi lain, terdapat individu atau kelompok yang juga tidak suka membayar pajak, apalagi dalam kondisi perekonomian yang tengah melemah; tetapi jika individu atau kelompok tersebut percaya bahwa dengan membayar pajak dapat memberikan kontribusi atas perbaikan perekonomian bangsa, maka individu atau kelompok tadi akan secara sadar untuk membayar pajak. Tetapi hal itu tidak mudah. Ini karena bermain ranah “kesadaran” publik merupakan hal yang sulit sebab pemerintah perlu merubah *mindset* warga.

1. Ada atau tidaknya sanksi hukum

Faktor penentu lainnya agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif adalah sanksi hukum. Orang akan melaksanakan dan menjalankan suatu kebijakan (kendati dengan perasaan terpaksa) karena mereka takut terkena dampak sanksi hukum yang dijabarkan oleh konten suatu kebijakan seperti denda, kurungan dan sanksi lainnya. Oleh karena itu, salah satu strategi yang sering digunakan oleh pembuat kebijakan agar subjek kebijakan menjalankan arahan kebijakan, maka sanksi hukum dihadirkan pada setiap kebijakan yang dibuatnya. Selain itu, subjek kebijakan seringkali mematuhi dan melaksanakan suatu aturan perundangan karena ia tidak suka dikatakan sebagai orang yang melanggar aturan hukum sehingga dengan terpaksa orang yang melanggar aturan hukum sehingga dengan terpaksa mereka melakukan apa yang diarahkan oleh kebijakan tersebut.

1. Kepentingan pribadi atau kelompok

Subjek kebijakan (individu maupun kelompok) sering memperoleh keuntungan langsung dari suatu pelaksanaan kebijakan. Maka tidak heran apabila efektifitas suatu implementasi kebijakan ikut dipengaruhi oleh penerimaan dan dukungan subjek kebijakan atas pelaksanaan suatu kebijakan.

1. Bertentangan dengan sistem nilai yang ada

Implementasi kebijakan pun dapat berjalan tidak efektif apabila bertentangan dengan sistem nilai yang ada di suatu daerah.

1. Keanggotaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi

Kepatuhan atau ketidakpatuhan seseorang atau sekelompok orang pada kebijakan dapat disebabkan oleh bergabung atau tidak bergabungnya subjek kebijakan dalam suatu organisasi tertentu atau tidak. Jika subjek kebijakan bergabung dalam suatu organisasi yang tengah membela suatu kebijakan, maka secara sadar ia akan mengikuti arah kebijakan organisasi. Tetapi sebaliknya, apabila tujuan organisasi dimasuki oleh subjek kebijakan tersebut bertolak belakang dengan ide dan gagasan organisasinya, maka seargumentatif apapun kebijakan yang sudar diinformasikan pemerintah untuk kepentingan publik akan sulit diterima oleh subjek itu. Dan realitas ini menunjukkan bahwa tidak semua kebijakan dapat berjalan efektif.

1. Wujudnya kepatuhan selektif

Tidak dapat dipungkiri bahwa semua subjek kebijakan patuh atas aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini karena ada sebagian besar masyarakat yang patuh pada suatu kebijakan tertentu, tetapi tidak pada kebijakan lain. Misalnya seorang pedagang kaki lima akan sangat patuh pada aturan lalu lintas jalan raya (ketika ia mengendarai motor); tetapi di sisi lain, ia justru tidak patuh pada kebijakan larangan untuk berdagang di kawasan-kawasan bebas PKL. Aturan pertama dioatuhi atas alasan keselamatan dirinya sedangkan aturan kedua dilanggarnya atas alasan pemenuhan kebutuhan keluarga. Kepatuhan dan ketidakpatuhan inilah yang dimaksud dengan kepatuhan selektif dan ini kondisi juga yang sangat menentukan efektif atau tidak efektif implementasi suatu kebijakan.

1. Waktu

Efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi juga oleh faktor waktu. Sebagai contoh, jika suatu masyarakat memandang suatu kebijakan bertolak belakang dengan kepentingan mereka, maka warga akan berkecenderungan untuk menolak kebijakan tersebut. Tetapi dengan berjalannya waktu, suatu kebijakan yang awalnya ditolak dan (mungkin) dianggap kontroversial bisa berubah menjadi kebijakan yang wajar dan dapat diterima oleh masyarakat.

1. Sosialisasi

Hal berikutnya yang dapat digunakan untuk menilai efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan adalah dilaksanakan atau tidaknya sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan berbagai hal yang akan dilaksanakan dan ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan yang diformulasikan. Tanpa sosialisasi yang cukup baik, maka tujuan kebijakan bisa jadi tidak tercapai.

1. Koordinasi antar lembaga atau antar organisasi

Implementasi kebijakan tidak jarang melibatkan banyak pemangku kebijakan dan *stakeholder*. Oleh karena itu, koordinasi merupakan mantra penting dalam menilai keefektifan suatu implementasi kebijakan. Terkadang suatu kebijakan dianggap baik dalam segi konten tapi lemah dalam segi pelaksanaan. Realita ini sangat mungkin terjadi karena koordinasi antar lembaga atau antar organisasi yang seharusnya menjalankan dan atau mengawasi justru tidak melaksanakan koordinasi tersebut. Padahal apabila koordinasi itu dilakukan bukan tidak mungkin suatu masalah publik dapat diselesaikan dengan segera.

* + 1. **Sistem Penanggulangan Bencana**

Indonesia menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius, hal ini menjadi konsen utama sejak terjadinya gempa bumi dan disusul tsunami yang menerjang Aceh dan sekitarnya pada 26 Desember 2004. Bencana merupakan suatu pembahasan yang sangat komprehensif dan multi-dimensi, dalam hal ini bencana merupakan sesuatu yang tak mungkin di hindari oleh masyarakat yang berada pada wilayah potensi bencana. Dalam menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan di implementasikan oleh semua pihak, yang mengartikan bencana adalah urusan semua pihak. Secara periodik, Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana. Sistem nasional ini mencakup beberapa aspek antara lain:

1. Legislasi

Dari sisi legislasi, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Produk hukum di bawahnya antara lain Peraturan Pemerintah , Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Kepala Badan, serta peraturan daerah. (Lebih detail lihat Produk Hukum).

1. Kelembagaan

Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Secara formal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan *focal point* lembaga pemerintah pada tingkat pusat. Sementara itu, *focal point* penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dari sisi non formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaran penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat nasional, terbentuk Platform Nasional (Planas) yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga internasional. Pada tingkat lokal, kita mengenal Forum PRB Yogyakarta dan Forum PRB Nusa Tenggara Timur.

1. Pendanaan

Saat ini kebencanaan bukan hanya isu lokal atau nasional, tetapi melibatkan internasional. Komunitas internasional mendukung Pemerintah Indonesia dalam membangun manajemen penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Di sisi lain, kepedulian dan keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap masalah bencana sangat tinggi dibuktikan dengan penganggaran yang signifikan khususnya untuk pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan.

Berikut beberapa pendanaan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia:

1. Dana DIPA (APBN/APBD)
2. Dana Kontijensi
3. Dana On-call
4. Dana Bantual Sosial Berpola Hibah
5. Dana yang bersumber dari masyarakat
6. Dana dukungan komunitas internasional
   * 1. **Manajemen Bencana**

Manajemen merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu dalam menyumbangkan upayanya terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumya. Manajemen merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan cara dan memahami bagaimana mereka harus melakukanya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang dilakukan.

Manajemen dipergunakan dalam lingkungan pendidikan, khususnya lingkungan sekolah. Secara etimologi kata manajemen merupakan terjemahan dari management. Kata manajemen sendiri berasal dari kata *manageatau magiare* yang berarti melatih kuda dalam melangkahkan kakinya. Dalam arti kegiatan berfikir dan kegiatan tingkah laku.

Manajemen merupakan suatu ilmu/seni yang berisi aktivitas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) dalam menyelesaikan segala urusan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada melalui orang lain agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen berasal dari to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Pengertian manajemen dapat disimpulkan adanya tiga hal yang merupakan unsur penting, yaitu: (a) usaha kerjasama,(b) oleh dua orang atau lebih, (c) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tiga unsur tersebut, yaitu gerak, orang, dan arah dari kegiatan, menujukan bahwa manajemen terjadi dalam sebuah organisasi, bukan pada kerja tunggal yang dilakukan oleh seorang individu.

Pelaksanaan manajemen sekolah akan dapat berhasil dan berjalan dengan baik jika didukung oleh kepemimpinan kepala sekolah yang secara fungsional mampu berperan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Kepala sekolah harus mampu menjadi manajer yang efisien dan efektif.

Bencana adalah hasil dari munculnya kejadian luar biasa (hazard) pada komunitas yang rentan (*vulnerable*) sehingga masyarakat tidak dapat mengatasi berbagai implikasi dari kejadian luar biasa tersebut. Manajemen bencana pada dasarnya berupaya untuk menghindarkan masyarakat dari bencana baik dengan mengurangi kemungkinan munculnya bahaya (*hazard*) maupun mengatasi kerentanan. Terdapat lima model manajemen bencana yaitu:

1. *Disaster management continuum model*

Model ini mungkin merupakan model yang paling popular karena terdiri dari tahap-tahap yang jelas sehingga lebih mudah di implementasikan. Tahap-tahap manajemen bencana di dalam model ini meliputi *emergency, relief, rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness,* dan *early warning*.

1. *Pre-during-post disaster model*

Model manajemen bencana ini membagi tahap kegiatan di sekitar bencana. Terdapat kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan sebelum bencana, selama bencana terjadi, dan setelah bencana. Model ini seringkali digabungkan dengan disaster management continuum model.

1. *Contract-expand model*

Model ini berasumsi bahwa seluruh tahap-tahap yang ada pada manajemen bencana (*emergency, relief, rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness*, dan *early warning*) semestinya tetap dilaksanakan pada daerah yang rawan bencana. Perbedaan pada kondisi bencana dan tidak bencana adalah pada saat bencana tahap tertentu lebih dikembangkan (*emergency* dan *relief*) sementara tahap yang lain seperti *rehabilitation, reconstruction,* dan *mitigation* kurang ditekankan.

1. *The crunch and release model.*

Manajemen bencana ini menekankan upaya mengurangi kerentanan untuk mengatasi bencana. Bila masyarakat tidak rentan maka bencana akan juga kecil kemungkinannya terjadi meski hazard tetap terjadi.

1. *Disaster risk reduction framework.*

Model ini menekankan upaya manajemen bencana pada identifikasi risiko bencana baik dalam bentuk kerentanan maupun *hazard* dan mengembangkan kapasitas untuk mengurangi risiko tersebut.

**2.1.11 Penanggulangan Bencana**



**Gambar 2.2** Siklus Penanggulangan Bencana

*Sumber: Khambali dalam Manajemen Penanggulangan Bencana (2017)*

Berdasarkan gambar di atas, siklus penanggulangan bencana dibagi menjadi 3 periode, yakni; Prabencana, pencegahan lebih difokuskan, kesiapsiagaan level medium. Bencana, pada saat kejadian atau krisis, tanggap darurat menjadi kegiatan terpenting. Pascabencana, pemulihan dan rekonstruksi menjadi proses terpenting setelah bencana.

Terkait dengan manajemen penanggulangan bencana, maka UU No. 24 tahun 2007 menyatakan “Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi”. Rumusan penanggulangan bencana dari UU tersebut mengandung dua pengertian dasar yaitu:

1. Penanggulangan bencana sebagai sebuah rangkaian atau siklus.
2. Penanggulangan bencana dimulai dari penetapan kebijakan pembangunan yang didasari risiko bencana dan diikuti tahap kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam UU No. 24 tahun 2007 secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tanggap Darurat Bencana

Serangkaian tindakan yang diambil secara cepat menyusul terjadinya suatu peristiwa bencana, termasuk penilaian kerusakan, kebutuhan (*damage* and *needs* *assessment*), penyaluran bantuan darurat, upaya pertolongan, dan pembersihan lokasi bencana. Tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia;
2. Mengurangi penderitaan korban bencana;
3. Meminimalkan kerugian material
4. Rehabilitasi

Serangkaian kegiatan yang dapat membantu korban bencana untuk kembali pada kehidupan normal yang kemudian diintegrasikan kembali pada fungsi-fungsi yang ada di dalam masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah penanganan korban bencana yang mengalami trauma psikologis. Misalnya : renovasi atau perbaikan sarana-sarana umum, perumahan dan tempat penampungan sampai dengan penyediaan lapangan kegiatan untuk memulai hidup baru

1. Rekonstruksi

Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan situasi seperti sebelum terjadinya bencana, termasuk pembangunan infrastruktur, menghidupkan akses sumber-sumber ekonomi, perbaikan lingkungan, pemberdayaan masyarakat; berorientasi pada pembangunan – tujuan : mengurangi dampak bencana, dan di lain sisi memberikan manfaat secara ekonomis pada masyarakat

1. Prevensi

Serangkaian kegiatan yang direkayasa untuk menyediakan sarana yang dapat memberikan perlindungan permanen terhadap dampak peristiwa alam, yaitu rekayasa teknologi dalam pembangunan fisik; yakni upaya memberlakukan ketentuan-ketentuan regulasi yang memberikan jaminan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pembebasan lokasi rawan bencana dari pemukiman penduduk, pembangunan saluran pembuangan lahar, pembangunan kanal pengendali banjir, dan relokasi penduduk.

1. Kesiapsiagaan Bencana

Upaya-upaya yang memungkinkan masyarakat (individu, kelompok, organisasi) dapat mengatasi bahaya peristiwa alam, melalui pembentukan struktur dan mekanisme tanggap darurat yang sistematis. Tujuan dari kesiagapan bencana adalah untuk untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum. Kesiapsiagaan Bencana meliputi upaya mengurangi tingkat resiko, formulasi Rencana Darurat Bencana (*Disasters Plan*), pengelolaan sumber-sumber daya masyarakat, pelatihan warga di lokasi rawan bencana

1. Mitigasi

Serangkaian tindakan yang dilakukan sejak dari awal untuk menghadapi suatu peristiwa alam – dengan mengurangi atau meminimalkan dampak peristiwa alam tersebut terhadap kelangsungan hidup manusia dan lingkungan hidupnya (struktural), yakni upaya penyadaran masyarakat terhadap potensi dan kerawanan (*hazard*) lingkungan dimana mereka berada, sehingga mereka dapat mengelola upaya kesiapsiagaan terhadap bencana. Mitigasi dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Mitigasi struktural

Upaya mengurangi risiko bencana dengan cara melakukan pembangunan prasarana fisik dengan spesifikasi tertentu dan memanfaatkan teknologi. Beberapa contoh penggunaan teknologi misalnya:

* Pembangunan kanal khusus untuk mencegah banjir.
* Penggunaan alat deteksi aktivitas gunung berapi.
* Membuat struktur bangunan yang tahan gempa
* Penggunaaan sistem peringatan dini untuk memperkirakan kemungkinan adanya gelombang tsunami.

Mitigasi struktural ini lebih mengedapankan tindakan mengurangi kerentanan terhadap bencana, yaitu dengan cara melakukan rekayasa bangunan yang tahan terhadap bencana. Dengan begitu, maka struktur bangunan dapat bertahan dalam menghadapi bencana atau hanya mengalami kerusakan yang tidak membahayakan manusia.

1. Mitigasi Non-Struktural

Mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi melalui kebijakan atau peraturan tertentu. Beberapa contoh mitigasi non-struktural adalah:

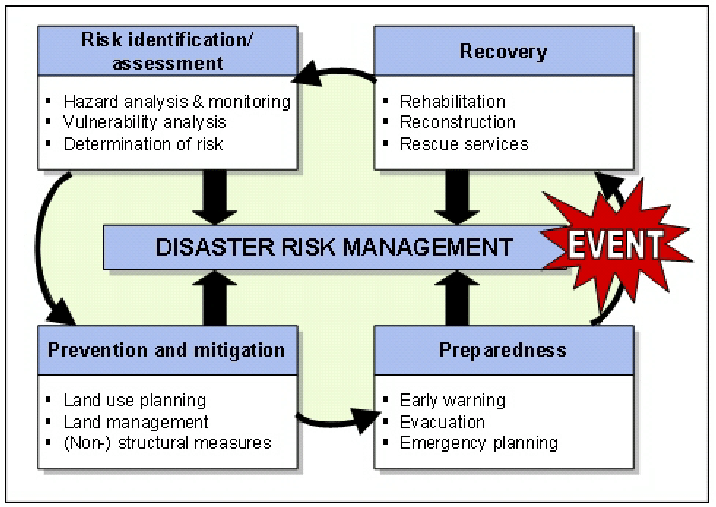
* Larangan membuang sampah ke selokan atau sungai.
* Mengatur tata ruang kota
* Mengatur kapasitas pembangunan masyarakat

Intinya, mitigasi non-struktural ini lebih berhubungan dengan pembuatan kebijakan dan peraturan yang tujuannya untuk mencegah terjadinya risiko bencana.

1. Sistem Peringatan Dini

Informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang kapan suatu bahaya peristiwa alam dapat diidentifikasi dan penilaian tentang kemungkinan dampaknya pada suatu wilayah tertentu.

Berkaitan dengan pergeseran paradigma, terdapat 4 (empat) hal fundamental yang berubah atas paradigma awal dalam penanggulangan bencana. Pertama, menjadi kesiapsiagaan. Tanggap darurat sampai hari ini memang penting dilakukan dan memang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana. Namun, tidak cukup hanya berhenti semata. Ada bencana, ada proses pertolongan, kemudian selesai. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana menyiapkan masyarakat untuk lebih cerdas dalam menghadapi bencana, mengurangi dampak risiko yang akan dihadapinya, serta mengelola pengetahuan menjadi kesadaran kolektif di dalam masyarakat sehingga tahan atau tangguh dalam menghadapi bencana yang menimpa.



**Gambar 2.3** *Disaster Risk Management*

*Sumber: Khambali dalam Manajemen Penanggulangan Bencana (2017)*

Kedua, dari sentralistik menjadi otonomi daerah. Pemerintah menyadari bahwa kejadian bencana haruslah direspons secara cepat dan tepat. Melihat penanganan selama ini yang semuanya diurus oleh pemerintah pusat, maka banyak terjadi keterlambatan dalam memberikan pertolongan dan bantuan. sinilah muncul paradigma baru, yakni penanganan bencana bisa dilaksanakan melalui pemerintah daerah yang bersifat otonomi.

Ketiga, dari pemerintah sentris menjadi partisipatori. Kemampuan pemerintah tidaklah cukup besar untuk menggelontorkan anggarannya guna membantu begitu banyak korban bencana yang terjadi hampir secara bersamaan dan berkesinambungan. Oleh karenanya, peran serta masyarakat lokal, nasional, maupun internasional dibutuhkan guna membantu memulihkan korban bencana tersebut. Inilah yang disebut dengan pergeseran paradigma dari pemerintah sentris menjadi partisipatori.

Keempat, dari kemurahan menjadi hak dasar; awalnya, pemerintah menyangka bahwa membantu korban bencana adalah sebuah kemurahan hati semata. Padahal ini adalah anggapan salah, sedangkan yang benar adalah bahwa membantu korban bencana itu memang karena hal itu merupakan hak dasar dari setiap warga negara Indonesia. Maka, tak salah jika disebutkan bahwa perlindungan merupakan bagian dari hak dasar dan pengurangan risiko adalah bagian dari pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) sebagai Lembaga Kemanusiaan Nasional yang memiliki Divisi *Rescue*, kemudian berbenah dengan nama divisi baru, yaitu *Disaster Risk Management* (DRM). Selain paradigma yang juga turut berubah, DRM PKPU juga senantiasa melahirkan program-program unggulan terkait pengurangan risiko bencana seperti CBDRM (*Community Based Disaster Risk Management*) yang di dalamnya terdapat projek Kampung Tangguh, Sekolah Siaga Bencana, dan beberapa program unggulan lainnya.

**Tabel 2.2** Pergeseran Paradigma Penanggulangan Bencana

|  |  |
| --- | --- |
| **Lama** | **Baru** |
| Bersifat respons | Pengurangan risiko (pencegahan dan kesiapsiagaan). |
| Penanganan sektoral | Multisektor, misalnya pemadaman kebakaran hutan dan lahan oleh multisektor dalam BNPB. |
| Sistem sentralistik | Desentralistik, pengecualian untuk kondisi emergensi tetap harus ada unsur sentralistik/komando. |
| Cara-cara konvensional | Holistik, penanganan dilakukan pada semua fase mulai dari prabencana, pada saat bencana dan pascabencana. Dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. |
| Anggaran urusan pemerintah | Peran serta asyarakat dan dunia usaha. |

*Sumber: Khambali dalam Manajemen Penanggulangan Bencana (2017:22)*

Menurut Williams (2011), dari perspektif analisis ekonomi politik, undang-undang dapat dipandang sebagai hasil dari proses politik. Setidaknya terlebih dahulu dilakukan diskusi dan/negosiasi di antara para stakebolder dalam formulasinya. Jadi, ada keterlibatan berbagai pihak, termasuk dari warga komunitas yang hidup atau bertempat tinggal di sekitar lingkungan yang rawan bencana.. Asumsinya, warga komunitas tersebut lebih mengerti tentang kebutuhan mereka sendiri dalam konteks PRB.

Dalam praktiknya, pemerintah seringkali gagal untuk benar-benar mematuhi atau melaksanakan sepenuhnya undang-undang terkait PRB. Secara umum ada kekurangan yang dapat diamati pada regulasi terkait PRB yang cenderung berfokus terutama pada kesiapsiagaan, respons dan agak kurang pada pengurangan risiko. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang/regulasi saja belum mampu mendorong upaya PRB.

Upaya ini juga menimbulkan tantangan organisasi karena merupakan kegiatan lintas sektor yang harus dikoordinasikan dan melibatkan banyak unit atau bagian dari scektor publik dan swasta. Selain itu, PRB tidak dapat dipahami sebagai kegiatan terpisah; ini adalah seperangkat prinsip-prinsip dan prioritás yang perlu diintegrasikan oleh pemerintah dan partisipan kunci lainnya.

* + 1. **Kebijakan Manajemen Bencana**

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan manajemen bencana mengalami beberapa perubahan kecenderungan. Beberapa kecenderungan yang perlu diperhatikan adalah:

1. Konteks politik yang semakin mendorong kebijakan manajemen bencana menjadi tanggung jawab legal.
2. Penekanan yang semakin besar pada peningkatan ketahanan masyarakat atau pengurangan kerentanan.
3. Solusi manajemen bencana ditekankan pada pengorganisasian masyarakat dan proses pembangunan.

Dalam penetapan sebuah kebijakan manajemen bencana, proses yang pada umumnya terjadi dalam beberapa tahap, yaitu penetapan agenda, pengambilan keputusan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Di dalam kasus Indonesia, Pemerintah Pusat saat ini berada pada tahap formulasi kebijakan (proses penyusunan beberapa Peraturan Pemerintah sedang berlangsung) dan implementasi kebijakan (BNPB) telah dibentuk dan sedang mendorong proses pembentukan BPBD di daerah). Sementara Pemerintah Daerah sedang berada pada tahap penetapan agenda dan pengambilan keputusan. Beberapa daerah yang mengalami bencana besar sudah melangkah lebih jauh pada tahap formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan.

Kebijakan manajemen bencana yang ideal selain harus dikembangkan melalui proses yang benar, juga perlu secara jelas menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Alokasi sumberdaya yang tepat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta antara berbagai fungsi yang terkait.
3. Perubahan peraturan dan kelembagaan yang jelas dan tegas.

Mekanisme kerja dan pengaturan antara berbagai portofolio lembaga yang terkait dengan bencana. Sistem kelembagaan penanggulangan bencana yang dikembangkan di Indonesia dan menjadi salah satu fokus studi bersifat kontekstual. Di daerah terdapat beberapa lembaga dan mekanisme yang sebelumnya sudah ada dan berjalan. Kebijakan kelembagaan yang di desain dari Pemerintah Pusat akan berinteraksi dengan lembaga dan mekanisme yang ada serta secara khusus dengan orang-orang yang selama ini terlibat di dalam kegiatan penanggulangan bencana.

* + 1. **Manajemen Bencana Berbasis Komunitas**

Manajemen Bencana Berbasis Komunitas atau biasa disebut *Community-based Disaster Management* (CBDM) ditujukan untuk meninjau perlunya pendekatan manajemen bencana berbasis masyarakat, bukan hanya untuk manajemen bencana itu sendiri tetapi untuk semua program pembangunan dalam rangka menghadapi bencana dengan pendekatan holistik. Kesadaran umum dari masyarakat tentang bencana masih rendah meskipun fakta bahwa masyarakat tertentu memiliki pengetahuan lokal tentang prediksi bencana dan mekanisme penanggulangannya. Peningkatan kesadaran dan persiapan masyarakat untuk memperkuat ketahanan terhadap bencana adalah suatu kebutuhan. Komponen manajemen bencana harus dimasukkan dalam program-program pembangunan sehingga dapat mengurangi dampak bencana.

1. Manajemen Bencana dan Partisipasi Komunitas

Suatu komunitas dalam konteks manajemen bencana dapat diartikan sebagai sebuah kelompok masyarakat yang dapat mempunyai satu atau dua kesamaan seperti misalnya tinggal di lingkungan yang sama, terpapar risiko bahaya yang serupa, atau sama-sama telah terkena dampak suatu bencana. Komunitas juga dapat mempunyai masalalh, kekhawatiran dan harapan yang sama tentang risiko bencana. Meskipun demikian, mereka yang tinggal dalam sebuah komunitas mempunyai kerentanan dan kapasitas yang berbeda-beda. Sebagian mungkin ada yang lebih rentan atau lebia mampu daripada yang lain.

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk tindakan manajemen bencana dan untuk mempertimbangkan peran yang dimainkan oleh stakeholder yang berbeda. Pendekatan *top down* yang berupa *command and control* seringkali digunakan untuk mengatur konsekuensi dari terjadinya bencana. Dalam pendekatan ini, keputusan datang dari otoritas yang lebih tinggi berdasarkan persepsi mereka pada kebutuhannya sendiri. Masyarakat/komunitas yang terkena bencana lebih banyak berfungsi sebagai objek penerima bantuan semata. Dalam prakteknya, pendekatan ini terbukti tidak efektif untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan korban bencana yang vital (Pandey& Okazaki, 2005).

Jadi, banyak dari program manajemen bencana yang bersifat *top-down* gagal untuk memenuhi kebutuhan lokal, mengabaikan potensi sumber daya dan kapasitas lokal, dan mungkin bahkan meningkatkan ketergantungan sekaligus kerentanan komunitas. Sebagai hasilnya, para praktisi manajemen bencana telah menghasilkan suatu kesepakatan umum untuk lebih memberikan penekanan pada program manajemen bencana oleh komunitas., Hal ini berarti bahwa komunitas yang rentan itu sendiri yang akan dilibatkan dalam berbagai aksi manajemen bencana bersama dengan semua entitas tingkat lokal, provinsi, dan nasional dalam bentuk kerjasama (Paripurno, 2008).

Pandey dan Okazaki (2005) menyatakan bahwa tanpa keberlanjutan dari manajemen bencana, maka upaya yang ada mungkin tidak akan melindungi. Elemen penting dari manajemen bencana yang berkelanjutan adalah partisipasi komunitas dalam kegiatan ini. Penekanan upaya manajemen bencana harus fokus pada komunitas dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Perlu ada kesempatan di mana orang dapat terlibat mulai dari tahap awal kegiatan manajemen bencana.

Partisipasi komunitas merupakan suatu proses untuk memberikan wewenang lebih luas kepada komunitas untuk secara kolektif memecahkan berbagai masalah kebencanaan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan komunitas dalam suatu program/kegiatan manajemen bencana. Partisipasi komunitas bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah dengan cara yang lebih baik, dengan memberi peran kepada komunitas untuk berkontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan (Paripurno, 2008).

Berada di garda depan, suatu komunitas perlu memiliki kapasitas untuk merespons ancaman bencana. Untuk alasan inilah komunitas harus dilibatkan dalam mengelola risiko yang mungkin mengancam kesejahteraan mereka. Sementara program pemberdayaan yang terkait dengan mitigasi bencana telah mencapai tujuannya, isu keberlanjutan yang bersifat jangka panjang dalam upaya ini masih jarang dibahas. Pemerintah, LSM dan organisasi nasional melaksanakan berbagai program sebelum dan sesudah bencana. Implementasi program dapat saja telah berlangsung dengan sukses, tetapi secara berangsur berkurang seiring perjalanan waktu. Mungkin ada saja alasan untuk kondisi seperti ini. Namun, bagaimanapun juga keberlanjutan merupakan isu yang serius dalám manajemen bencana.

1. CBDM

Manajemen bencana berbasis komunitas (CBDM) mempromosikan pendekatan bottom up yang bekerja selaras dengan pendekatan *top down* untuk menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Agar pelaksanaannya efektif, maka komunitas lokal harus didukung dalam menganalisis kondisi berbahaya, kerentanan dan kapasitas mereka saat mereka mempersepsi diri mereka sendiri. Dalam kasus bencana, orang-orang di tingkat komunitas memang cenderung lebih kehilangan karena mereka adalah orang-orang yang langsung dilanda bencana. Mereka adalah pihak pertama yang menjadi rentan terhadap efek dari kejadian berbahaya tersébut.

Di sisi lain, mereka memiliki sebagian besar keuntungan jika mereka mampu mengurangi dampak bencana terhadap komunitas mereka. Konsep ini memunculkan gagasan manajemen bencana berbasis komunitas di mana (warga) komunitas diposisikan di garis terdepan. Melalui CBDM diharapkan bahwa komunitas akan diperkuat untuk memunginkan mereka melakukan semua program manajemen bencana, termasuk dalam konteks kesiapsiagaan dan mitigası bencana. Meskipun komunitas diberikan peran yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksaraan, CBDM tentu saja tidak mengabaikan pentingnya evaluasi risiko dan perencanaan secara ilmiah dan objektif. Pendekatan CBDM mengakui bahwa stakeholders yang lain harus terlibat dalam proses, dengan tujuan akhir untuk mencapai kapasitas sumber daya manusia, khususnya pihak/komunitas yang rentan terhadap bencana (Pandey dan Okazaki, 2005)

Maksud dari pendekatan CBDM adalah untuk mengurangi kerentanan dan memperkuat kapasitas komunitas dalam manajemen bencana. Tujuan utama dari CBDM adalah untuk memberdayakan masyarakat (lokal) dengan mendukung mereka untuk menjadi semakin mandiri. CBDM dapat dinyatakan sebagai "suatu upaya yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang paling mungkin terkena bahaya, dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan kegiatan operasional di semua level tanggung jawab manajemen bencana." Namun demikian, Lavell (1994) menyatakan bahwa kelemahan utama dari pendekatan berbasis masyarakat terletak pada relatif kurangnya sumber daya dalam pengambilan keputusan, kekuasaan legislatif dan peraturan yang tersedia untuk aktor dan lembaga di tingkat lokal.

Selanjutnya, penjelasan mengenai tantangan, pendekatan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan kerjasama stakebolder dalam CBDM, yaitu sebagai berikut:

1. Tantangan, tantangan utama CBDM adalah keberlanjutan upaya yang dilakukan di tingkat masyarakat dan integrasi isu CBDM di tingkat kebijakan. Agar efektif dan membuat dampak yang berkelanjutan, penerapan CBDM harus melampaui inisiatif masyarakat lokal, LSM dan pemerintah daerah. Penilaian kerentanan dan kapasitás merupakan komponen utama dalam CBDM karena harus terkait dengan situasi- kondisi dan masyarakat lokal.
2. Pendekatan, pendekatan CBDM diawali untuk mengatasi penyebab kerentanan sebagai bagian dari upaya pembangunan yang lebih luas dan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan luar; memobilisasi relawan dan target yang paling rentan; peningkatan kesiapan masyarakat (sipil) dan tanggapan pemerintah terhadap dampak bencana; melindungi dan menjamin pembangunan sosial ekonomi yang positif, dan mengurangi kematian dan kehancuran yang masif.
3. Partisipasi Masyarakat, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan akan memungkinkan mereka untuk memahami masalah dan kapasitasnya. Masyarakat setempat juga dapat dengan mudah memahami realitas dan konteks yang lebih baik daripada orang luar.
   1. **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan kerangka untuk mengalirkan jalan pikiran yang logis (*logical construct*). Kerangka pemikiran diarahkan untuk menjawab secara rasional atas masalah yang dirumuskan.

Edwards III dalam buku Leo Agustino (2017:136) mengemukakan model implementasi kebijakan yang dikenal dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*.Terdapat empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino), adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, akurat dan konsisten. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu:

1. Transmisi**,** penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan kareka komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
2. Kejelasan**,** komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
3. Konsistensi**,** perintah yang diberikan dalam pelaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.
4. Sumber Daya

Merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III**,** dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

1. Staf**,** sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya.
2. Informasi**,** dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai 2 bentuk yaitu (i)informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
3. Wewenang**,** pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
4. Fasilitas**,** fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya
5. Disposisi

Disposisi adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut Edward III adalah:

1. Efek disposisi**,** disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
2. Melakukan pengaturan birokrasi**,** Edward III menyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu pengaturan birokrasi juga bermuara pada “pembentukan” sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personal.
3. Insentif**,** Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai usaha memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.
4. Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan kordinasi dengan baik. Dua karakteristik menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah :

1. Membuat *standard operating prosedures* (SOPs) yang lebih fleksibel, SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya.
2. Melaksanakan fragmentasi**,** tujuannya untuk menyebar tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur biroktasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan organisasi yang kompeten dan kapabel.

KOMUNIKASI

SUMBER DAYA

IMPLEMENTASI

DISPOSISI

STRUKTUR BIROKRASI

**Gambar 2.4** Model Pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation*

*Sumber: Edward III (1980:21)*

* 1. **Proposisi**

1. Implementasi Kebijakan Program Penanganan Darurat Kebencanaan di Kabupaten Bandung ditentukan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
2. Terdapat kendala dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Darurat Kebencanaan di Kabupaten Bandung.
3. Terdapat usaha-usaha dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Darurat Kebencanaan di Kabupaten Bandung.

**BAB III**

**OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

Bab 3 berisi tentang penguraian bagaimana penelitian ini dilaksanakan, terdiri dari penjabaran objek penelitian dan metode penelitian.

**3.1 Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah mengenai implementasi kebijakan program penanganan daruratan kebencana. Penelitian ini dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung sebagai instansi pemerintah yang implementasi kebijakan programnya akan diteliti.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang bertanggungjawab dalam penanganan bencana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.

**3.1.1** **Visi dan Misi**

BPBD Kabupaten Bandung sebagai salah satu instansi dari Pemerintah Kabupaten, dalam menetapkan visinya tentu harus mengacu kepada Visi Kabupaten Bandung dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Visi Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 yaitu :

**“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”**

Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 adalah:

**”Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bandung dalam Menghadapi Bencana”.**

Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BPBD Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi tersebut juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BPBD.

Adapun rumusan Misi BPBD Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah.

**3.1.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan BPBD Kabupaten Bandung merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari BPBD kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan misi BPBD Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.

Misi pertama BPBD Kabupaten Bandung yaitu Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana, dengan tujuan yakni berkurangnya potensi kerugian dan korban akibat bencana, serta sasaran meningkatnya kecepatan penanggulangan bencana;

Misi kedua BPBD Kabupaten Bandung yaitu mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, dengan tujuan tersedianya daya dukung yang memungkinkan pelaksanaan penanggulangan bencana berjalan dengan efektif, dan sasaran penyediaan perlengkapan pendukung Rescue yang diperlukan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung.

Misi ketiga BPBD Kabupaten Bandung yaitu meningkatkan kemampuan aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana, dengan tujuan agar efektifnya setiap penanggulangan bencana dengan berbasis masyarakat dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal pada daerah rawan bencana, dengan sasaran mengakomodir dan mengkoordinir serta memberdayakan masyarakat peduli bencana dalam unit cegah siaga maupun unit reaksi cepat.

Misi keempat BPBD Kabupaten Bandung yaitu : Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana, dengan tujuan dan sasaran yakni meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan resiko dan mitigasi bencana, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penangulangan bencana, dengan sasaran utama masyarakat di wilayah rawan bencana.

Misi kelima BPBD Kabupaten Bandung yaitu : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat terjadi bencana, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah, dengan tujuan terpadunya dan tuntasnya penanggulangan bencana, dengan sasaran sebagai berikut :

Saat tidak terjadi bencana berupa pengurangan resiko bencana, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Pemetaan kawasan rawan bencana
2. Upaya pencegahan dan peringatan dini pada kawasan rawan bencana
3. Pemberdayaan masyarakat
4. Penguatan kelembagaan

Saat terjadi bencana, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Tanggap darurat
2. Pemulihan kondisi traumatik dan dampak bencana lainnya
3. Rehabilitasi sarana dan prasarana umum
4. Rekonstruksi infrastruksi, sosial, ekonomi dan kelembagaan

**3.1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

1. Kedudukan
2. BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
3. BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
4. Tugas
5. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penangan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan sesuia dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
8. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penangan bencana;
9. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
10. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
11. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
13. Fungsi
14. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
15. Pengkoodinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

**3.1.4 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahkan :
   1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
   2. Sub. Bagian Keuangan
   3. Sub. Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
   1. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana
   2. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
   1. Seksi Pencegahan Bencana
   2. Seksi Kesiapsiagaan Bencana
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
   1. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana
   2. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana

**3.1.5 Kondisi Kepegawaian**

Adapun sumber daya manusia yang ada pada BPBD Kabupaten Bandung dalam melaksanakan roda organisasi sebagai berikut :

**Tabel 3.1** Keberadaan Personil Berdasarkan Golongan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tingkat Golongan | Jumlah (Orang) |
| 1. | Golongan IV | 6 Orang |
| 2. | Golongan III | 13 Orang |
| 3. | Golongan II | 7 Orang |
| 4. | Golongan I | 0 Orang |
| **Jumlah** | | **26 Orang** |

*Sumber: RENSTRA BPBD Kab. Bandung 2016-2021*

**3.2 Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*) yang berfokus pada implementasi kebijakan program penanganan darurat kebencanaan. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011),

“Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara actual.”

Maka metode penelitan deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu fenomena, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Dengan demikian, peneliti beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

Penelitian mengacu pada penerapan metode penelitian kualitatif. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk & Niller:

“Metodelogi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kaitannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya.” (dalam Nasution, 1988:23)

Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dalam melaksanakan penelitian ini. Kasus adalah suatu “sistem yang terbatas” (*a bounded system*) – Louis Smith (1978). “Terbatas” yang di maksud tidak harus rumit, tapi pasti unik. Pendekatan studi kasus merupakan proses mengkaji kasus dengan *output* berupa hasil dari proses pengkajian. Studi kasus akan berfokus pada kasus-kasus yang tidak umum. Unit analisisnya adalah kasus itu sendiri. Tujuannya bukan untuk memahami konstruk abstrak atau fenomena umum tertentu, bukan untuk merumuskan suatu teori. Sedangkan *instrumental study* digunakan untuk meneliti suatu kasus tertentu agar tersaji sebuah perspektif tentang isu atau perbaikan suatu teori. Dalam hal ini, kasus tidak menjadi minat utama; kasus memainkan peranan suportif, yang memudahkan pemahaman kita tentang sesuatu yang lain. Sering digunakan untuk mencari kesamaan pola dari sebuah peristiwa yang sering muncul atau berulang. Pendekatan studi kasus yang diterapkan pada penelitian ini berfokus pada kasus implementasi kebijakan Program Penanganan Darurat Kebencanaan pada Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Dalam metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (tatap muka) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian (Moleong, 1991:135).

Wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara terhadap informan kunci yakni Aparatur BPBD Kabupaten Bandung serta beberapa informan lain yakni *oppinion leader* atau pemuka pendapat di masyarakat, masyarakat yang menjadi korban bencana serta elemen lain yang terlibat. Wawancara ditujukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan program berjalan.

Sumber dan jenis data yang akan di analisis dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari *Key Informan* yaitu Kepala Bidang terkait, lalu Informan yakni pemuka pendapat di masyarakat, masyarakat yang menjadi korban bencana serta elemen lain yang terlibat.. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung yakni melalui media perantara.

**3.2.1** **Operasionalisasi dan Parameter Penelitian**

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2013:58). Operasional variabel merupakan aspek penelitian yang memberikan informasi mengenai cara mengukur variabel secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian. Menjadi petunjuk dalam mengukur suatu variabel yang dibangun berdasarkan konsep penelitian. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Berikut penguraian dari kedua variabel tersebut:

1) Variabel Bebas (*Independent Variable*) Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Implementasi.

2) Variabel Terikat (*Dependent Variable*) Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan program.

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional penelitian menggunakan variabel berupa Implementasi. Variabel tersebut terdiri dari 4 dimensi yakni:

1. Komunikasi

Dimensi komunikasi di nilai dari beberapa indikator yaitu transmisi, kejelasan dan kosistensi. Ketiga indikator tersebut merupakan komponen yang menjadi pertanyaan dalam pedoman wawancara yang ditujukan kepada Aparat BPBD Kab. Bandung. Dimensi Komunikasi juga menjadi acuan dalam pertanyaan yang diajukan kepada informan eksternal yakni warga Kecamatan Rancaekek dalam menilai penanganan darurat kebencanaan pada wilayah tersebut.

1. Sumber Daya

Sumber daya dinilai dengan indikator Staff, Informasi, Wewenang dan Fasilitas. Keempat indikator tersebut menjadi acuan dalam membentuk pertanyaan yang diajukan kepada Informan yakni Aparat BPBD Kabupaten Bandung, dimensi Sumber Daya juga diperoleh dari data sekunder berupa pelaksanaan studi dokumentasi pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bandung tahun kerja 2016-2021.

1. Disposisi

Disposisi dinilai dengan indikator berupa efek disposisi, melakukan pengaturan birokrasi dan insentif. Ketiga indikator tersebut merupakan acuan dalam pembentukan pertanyaan kepada Aparat BPBD Kabupaten Bandung serta didukung oleh data sekunder berupa dokumentasi pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bandung tahun kerja 2016-2021.

1. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dinilai dengan indikator membuat *standard operating procedures* (SOP) dan fragmentasi. Kedua indikator menjadi acuan pembuatan pertanyaan untuk wawancara Aparat BPBD Kab. Bandung juga studi dokumentasi pada LKIP dan Renstra tahun kerja 2016-2021.

**3.2.2 Informan**

Teknik pemilihan informan adalah teknik sampling purposif (*purposive sampling*). Teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan riset. Sedangkan orang-orang dalam populasi yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sampel (Kriyantono, 2006) Menurut Spradley dalam Moleong, informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Subjek yang telah lama intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terikat penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi (Moleong, 2000)

Penentuan informan dalam penelitian ini dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. *Key* Informan: Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bandung.
2. Informan: Kepala Seksi Logistik BPBD Kabupaten Bandung.
3. Informan: Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung.
4. Informan: Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Rancaekek.
5. Informan: Aparatur Kelurahan Rancaekek Kencana.
6. Informan: Aparatur Desa Jelegong..
7. Informan: Ketua RW 23 Desa Jelegong.
8. Informan: Warga Desa Jelegong (1 orang).
9. Informan: Polisi Bhabinkamtibmas.
10. Informan: TNI Bhabinsa.
11. Informan: Pemudi Kecamatan Rancaekek.

**3.2.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian bertajuk “Implementasi Kebijakan Program Penanganan Darurat Kebencanaan BPBD Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Kecamatan Rancaekek)” terdiri dari beberapa teknik, di antaranya:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertukaran percakapan dimana dalam percakapan tersebut seseorang (pewawancara) mendapatkan informasi dari yang lain (narasumber). Dalam konteks penelitian, maka dengan penggunaan metode wawancara peneliti akan mendapatkan informasi yang mendalam (*indepth interview*) karena peneliti dapat terus mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan di luar pedoman wawancara, sesuai dengan respon atau jawaban yang di berikan oleh informan.

Adapula metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin merupakan wawancara yang telah dipersiapkan secara terstruktur, wawancara yang dilaksanakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah di persiapkan sebelumnya, yakni pedoman wawancara. Implementasi Kebijakan memiliki indikator-indikator yang kemudian disesuaikan dengan pertanyaan yang akan dilontarkan, maka dari itu peneliti akan menggunakan metode wawancara terpimpin.

1. Observasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Observasi memiliki arti sebagai berikut:

**Observasi**/*ob·ser·va·si*/ /obsérvasi/ n peninjauan secara cermat.

Observasi merupakan suatu metode ilmiah dalam ilmu pengetahuan empiris, kegiatan menganalisa suatu objek penelitian yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara sistematis dan terencana dengan menggunakan data-data yang akurat dan spesifik dengan hasil observasi yang logis, materialis dan objektif.

Observasi yang akan dijalankan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi. Observasi partisipasi menitikberatkan pada keterlibatan peneliti dengan kegiatan sehari-hari orang-orang yang akan dijadikan objek penelitian, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.

1. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penggunaan studi dokumentasi merupakan upaya dalam pengumpulan data sekunder. Dokumen adalah segala bentuk tertulis maupun film akan sebuah objek yang sudah tersedia sebagai rekap kerja atau kegiatan, dokumen merupakan sumber data yang akurat yang dapat di manfaatkan untuk menguji dan menafsirkan kembali. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian, dalam konteks penelitian ini, maka lembaga yang dimaksud adalah BPBD Kabupaten Bandung.

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *library research* adalah pengumpulan data dengan mengkaji teori-teori terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian, sumber data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, internet serta sumber-sumber umum lainnya yang menghimpun informasi dengan data yang objektif sebagai acuan penelitian.

**3.2.4 Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif merupakan upaya dalam mengumpulkan data, menyuntingnya, lalu memilah-milahnya untuk menadi satuan yang dapat di olah dan dikelola untuk kemudian mensintesiskannya agar mendapatkan pola-pola yang dapat di pahami dan bersifat objektif. Dalam proses melakukan analisis data, Seiddel (1998) mengemukakan bahwa prosesnya terdiri dari mencatat, mengumpulkan dan berpikir.

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam berbagai macam cara dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis). Analisis terdiri dari 4 modus, yaitu hermeneuti, semiotik, narasi dan metafor. (Bogdan dan Biklen, 1982)

Dalam penelitian terkait, peneliti akan menggunakan modus semiotik dengan penerapan analisis konten, analisis pembicaraan dan analisis wacana. Analisis konten adalah teknik penelitian yang digunakan untuk referensi yang replikabel dan valid dari data pada konteksnya. Peneliti mencari bentuk dan struktur serta pola yang berarturan dalam teks dan membuat kesimpulan atas dasar keteraturan yang ditemukan itu.

Adapula analisis pembicaraan, dalam analisis pembicaraan, makna diasumsikan bahwa makna itu dipertajam dalam konteks pertukaran. Peneliti itu sendiri tenggelam dalam situasi untuk mengungkapkan latar belakang penerapannya. Analisis pembicaraan diterapkan pada wawancara dengan informan terkait untuk mempertajam maksud informan dan di representasikan kedalam bentuk data.

Lalu bentuk analisis wacana, analisis wacana dibangun dari analisis konten dan analisis percakapan. Tetapi berfokus pada ‘permainan bahasa’. Permainan bahasa adalah suatu interaksi satuan-satuan yang terdefinisikan dengan baik terdiri atas urutan gerak verbal yang berubah menjadi frasa-frasa, yaitu penggunaan metafor dan alegori yang memainkan peranan penting. Analisis wacana dapat diterapkan pada studi dokumentasi BPBD Kabupaten Bandung juga pada studi kepustakaan untuk kemudian dikaitkan dengan topik utama penelitian yakni implementasi kebijakan program.

Selain itu, dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan suatu proses. Dengan demikian, Miles dan Huberman mencatat bahwa analisis data itu merupakan suatu kegiatan: (1) pengurutan data sesuai dengan rentang permasalahan atau urutan pemahaman yang ingin diperoleh, (2) pengorganisasian data dalam formasi, kategori, ataupun unit pemberian tertentu sesuai dengan antisipasi peneliti, (3) interpretasi peneliti berkenaan dengan signifikansi butir-butir ataupun satuan data sejalan dengan pemahaman yang ingin diperoleh, dan (4) penilaian atas butir ataupun satuan data, sehingga membuahkan kesimpulan: baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, signifikan atau tidak signifikan. Mengacu pada model analisis interaktif yang diajukan Huberman dan Miles (1994: 431) tersebut. Seorang peneliti dalam melakukan kegiatan analisis perlu memperhatikan tahap kegiatan interaktif sebagai berikut:

1. Penataan “data mentah”, data tersebut mungkin berupa catatan lapangan, rekaman, maupun dokumen.
2. Pemilahan data yang didasarkan pada hasil penulisan ulang, transkripsi, maupun catatan reflektif dan memo yang disusun peneliti sewaktu melakukan kegiatan pengumpulan data.
3. Pengkodean data sesuai dengan karakteristik informasi yang dimuat dalam kaitannya dengan fokus pemahaman yang ingin diperoleh.
4. Pemertalian koherensi data secara analitis, dalam arti peneliti berusaha memahami hubungan antara informasi yang termuat dalam satuan data yang satu dan yang lain, sehingga dapat dipahami koherensi semestinya.
5. Identifikasi hubungan makna antara data yang satu dengan data yang lain, sehingga peneliti dapat menentukan satuan dan hubungan sekuensinya secara tepat.
6. Transposisi data ke dalam bentuk bagan spesifikasi, matriks, tabel, histogram, grafik, dan sebagainya sesuai dengan karakteristik informasi yang teremban di dalamnya.
7. Pemaparan makna, informasi, ataupun karakteristik sesuatu secara empirik sesuai dengan segmentasi dan sekuensinya penjelasan/ deskripsi yang diberikan.
8. Penulisan ulang tentang pemaparan makna, informasi, ataupun karakteristik sesuatu dalam dimensi hubungannya dengan masalah, landasan teori yang digunakan, cara kerja yang digunakan, dan temuan pemahaman yang didapatkan.

Secara umum model analisis interaktif tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Pengumpulan Data

Penyajian Data

Reduksi Data

Kesimpulan atau Verifikasi

**Gambar 3.1** Teknik Analisis Data

*Sumber: Huberman dan Miles (1994)*

Pengumpulan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, studi literatur dan studi dokumentasi kemudian di olah dalam bentuk reduksi data. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data, data yang telah diperoleh dirunut berdasarkan parameter penelitian, sehingga data yang tidak diperlukan hanya menjadi data pendukung atau data penguat hasil penelitian. Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan atau *field note*), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Proses terakhir adalah membentuk kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan atau pembuktian terhadap proposisi yang telah disusun dengan data yang didapatkan selama penelitian.

* + 1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di dua tempat, yaitu Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Bandung yang berlokasi di Jalan Raya Soreang KM 17 Soreang Kabupaten Bandung dan Kecamatan Rancaekek. Jadwal Penelitian disusun pada tabel *Gantt Chart* berikut.

**Tabel 3.2** Jadwal Penelitian

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Waktu | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | | April | | | |
| Agenda | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Penyusunan Instrumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Analisis Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pelaporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Hasil Penelitian**

Penelitian ini bertempat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum didalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Terletak di komplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM.17 Soreang Kabupaten Bandung.

**4.1.1 Gambaran Umum BPBD Kabupaten Bandung**

1. Jumlah Pegawai

Sumber daya manusia yang ada pada BPBD Kabupaten Bandung dalam melaksanakan roda organisasi sebagai berikut :

**Tabel 4.1** Keberadaan Personil Berdasarkan Golongan

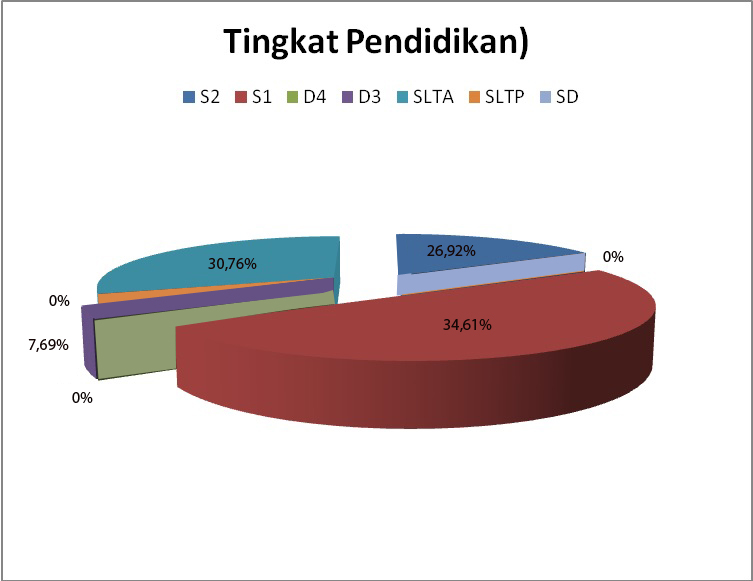
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tingkat Golongan** | **Jumlah (Orang)** |
| 1 | Golongan IV | 6 Orang |
| 2 | Golongan III | 13 Orang |
| 3 | Golongan II | 7 Orang |
| 4 | Golongan I | 0 Orang |
| **Jumlah** | | **26 Orang** |

*Sumber: RENSTRA BPBD Kab. Bandung 2016-2021*

**Tabel 4.2** Keberadaan Personil Berdsarkan Tingkat Pendidikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Orang) |
| 1 | S2 | 7 Orang |
| 2 | S1 | 9 Orang |
| 3 | D4 | 0 Orang |
| 4 | D3 | 2 Orang |
| 5 | SLTA | 8 Orang |
| 6 | SLTP | 0 Orang |
| 7 | SD | 0 Orang |
| **Jumlah** | | **26 Orang** |

*Sumber: RENSTRA BPBD Kab. Bandung 2016-2021*

****

**Gambar 4.1** KomposisiKeberadaan Personil berdasarkan Tingkat Pendidikan

*Sumber: RENSTRA BPBD Kab. Bandung 2016-2021*

**Tabel 4.3** Keberadaan Personil Berdasarkan Pendidikan Struktural

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tingkat Golongan** | **Jumlah** |
| 1 | Adum/DiklatpimIV/Spada | 10 Orang |
| 2 | Adumla/Spala | 0 Orang |
| 3 | Spama/Diklatpim III/Spadya | 3 Orang |
| 4 | Diklatpim II/Spamen | 1 Orang |
| **Jumlah** | | 1. **Orang** |

*Sumber: RENSTRA BPBD Kab. Bandung 2016-2021*

**Tabel 4.4** KeberadaanPersonilnonPNS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
| 1 | Pekerja Harian Lepas (PHL) |  |
|  | - S1 | 5 Orang |
|  | * D3 | 4 Orang |
|  | * D4 | 1 Orang |
|  | - SLTA/STM/SMA/SMK | 34 Orang |
|  | - SLTP/SMP | 4 Orang |
|  | - SD | 2 Orang |
| **Jumlah** | | **50 Orang** |

*Sumber: RENSTRA BPBD Kab. Bandung 2016-2021*

* + 1. **Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Bandung**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Kepala BPBD Kabupaten Bandung

Kepala BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pengarah yang mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggapan darurat dan pasca bencana. Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.
2. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
3. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Kepala Pelaksana

Kepala BPBD Kabupaten Bandung, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana. Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

1. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana.
2. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Penetapan rumusan kebijakan pengomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.
6. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
7. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana.
8. Sekretaris

Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat Unsur Pelaksana, yakni Sekretariat Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
2. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu.
3. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.
4. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
5. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Badan.
6. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan.
7. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan.
8. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan.
9. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
10. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
11. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
12. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Sekretaris, membawahkan Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan progran Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan.
2. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan.
3. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan.
4. Pelaksanaan Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas.
5. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
7. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
8. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
9. Kepala Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.vKepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.
2. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.
3. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
4. Pelaksanaan Pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepala sub unit kerja di lingkungan Badan.
5. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas.
6. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.
7. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat.
8. Pelaksanaan kepengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.
9. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
10. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian Badan.
11. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai di lingkungan Badan.
12. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai di lingkungan Badan.
13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
14. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
15. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
16. Kepala Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.
2. Pelaksanaan pengumpul, belanja dan pembiayaan Badan.
3. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
4. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja.
5. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawnegeri sipil.
6. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan
7. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.
8. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.
9. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala Bidang di lingkungan Badan.
10. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan tugas pengelolaan keuangan.
11. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan.
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
13. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
14. Pelaksanaan koordinasi pngelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penaggulangan bencana.
2. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
3. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
4. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
5. Penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
6. Penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana untuk kead aan darurat bencana.
7. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil.
8. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
9. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
10. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :

1) Seksi Pencegahan Bencana

2) Seksi Kesiapsiagaan Bencana

1. Seksi Pencegahan Bencana

Kepala Seksi Pencegahan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan pencegahan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Seksi Pencegahan Bencana menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana.
2. Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap resiko bencana.
3. Penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana.
4. Penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat bencana.
5. Pelaksanaan dan penyusunan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana.
6. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana.
7. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana.
8. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan dan mitigasi pada prabencana.
9. Pelaksanaan pengawasan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana.
10. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bencana.
11. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.
12. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
13. Pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
14. Seksi Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
15. Kepala Seksi Kesiapsiagaan

Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan Kesiapsiagaan Bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Kesiapsiagaan Bencana menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana.
2. Penyusunan bahan rumusan kebijakan mekanisme sistem pencegahan dini kebencanaan.
3. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil.
4. Penyusunan bahan rumusan kebijakan kem memobilisasi sumber daya.
5. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana.
6. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana.
7. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.
8. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
9. Pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

5. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
2. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
3. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
4. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
5. Penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
6. Penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan belogistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsian, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi.
7. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
8. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang logistik penanggulangn bencana.

Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :

1. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
2. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana
3. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

Kepala Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat penanganan penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana operasional dan program tanggap darurat dan penanganan pengungsian penanggulangan bencana.
2. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum.
3. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga.
4. Penyusunan bahan rumusan kebijakan evakuasi para korban ke tempat yang aman.
5. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando di lokasi bencana.
6. Penyusunan dan bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi.
7. Pelaksanaan penanganan bencana alam tingkat lokal.
8. Penyusunan bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penanganan bencana.
9. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.
10. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
11. Pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

2) Seksi Logistik Penanggulangan Bencana

Kepala Seksi Logistik Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan logistik penanggulangn bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Logistik Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangn bencana.
2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
3. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik.
4. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda.
5. Penyusunan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana.
6. Pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana.
7. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.
8. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
9. Pelaksanaan koordinasi pelayanan logistik penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
2. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
3. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
4. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
5. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik.
6. Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
7. Penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
8. Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban.
9. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
10. Penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana.
11. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah.
12. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
13. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, membawahkan:

1. Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana
2. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana

1) Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana

Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat penanganan rehabilitasi pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rehabilitasi pasca bencana.
2. Penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik.
3. Penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
4. Penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantua darurat berupa sandang, lauk-pauk, famili kit, kid ware serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan.
5. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana.
6. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.
7. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
8. Pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangn bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

2) Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana

Kepala Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi:

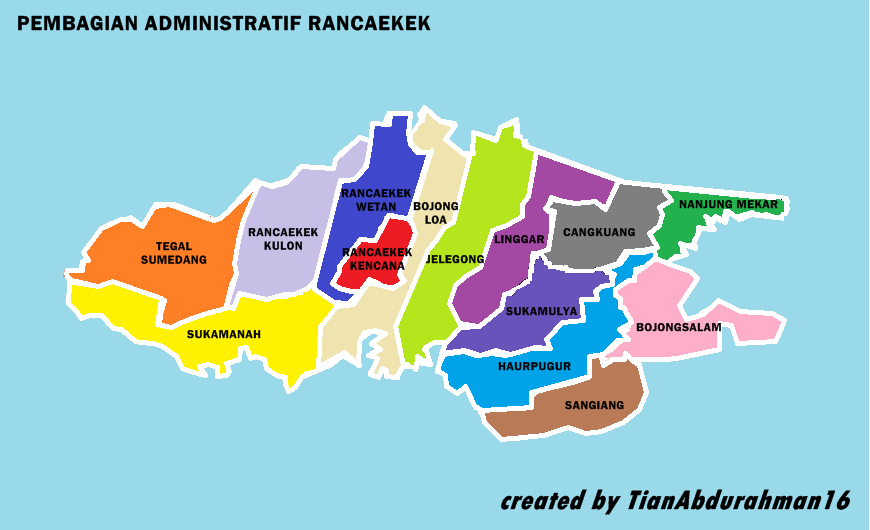
1. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rekonstruksi pasca bencana.
2. Penyusunan bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya.
3. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana.
4. Penyusunan bantuan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana.
5. Penyusunan bantuan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah.
6. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.
7. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
8. Pelaksanaan koordinasi rekonstruksi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

7. Satuan Tugas

Satuan Tugas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kaji cepat bencana dan dampak bencana. Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana terhadap penilaian kebutuhan dan penilaian kebutuhan dan penilaian kerusakan/ kerugian.
2. Pelaksanaan pemberian dukungan dan pendampingan terhadap Kepala Pelaksana BPBD dalam penanganan tanggap darurat bencana.
3. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap jumlah korban dan kerusakan sarana dan prasarana.
4. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap gangguan terhadap fungsi pelayanan umum, pe terhadap meintahan dan kemampuan sumber daya.
5. Pelaksanaan pemberian saran terhadap upaya penanganan bencana.
6. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
   * 1. **Gambaran Umum Kecamatan Rancaekek**

Rancaekek merupakan kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan luas 4.329,50 hektare atau 43,295 km2, jumlah penduduk sebanyak 160.435 jiwa serta kepadatan 3705,624 jiwa/km² atau 37,056 jiwa/hektar². Kecamatan Rancaekek terbagi atas 13 desa dan 1 kelurahan, berikut peta administratif wilayah Kecamatan Rancaekek.



**Gambar 4.2** Peta Pembagian Administratif Rancaekek

*Sumber: Wikipedia*

Kecamatan Rancaekek meliputi 13 desa dan 1 kelurahan, yaitu Bojongloa, Bojongsalam, Cangkuang, Haurpugur, Jelegong, Linggar, Nanjungmekar, Rancaekek Kulon, Rancaekek Wetan, Sangiang, Sukamanah, Sukamulya, Tegalsumedang dan Kelurahan Rancaekek Kencana.

Rancaekek adalah salah satu dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Letaknya di bagian timur Kabupaten Bandung, tidak jauh dari Pintu Tol Cileunyi. Letak Rancaekek begitu strategis, selain berada pada lintasan jalan negara antara Bandung - Garut, Tasikmalaya, Pangandaran dan Jawa Tengah, juga berbatasan langsung dengan Kota Pendidikan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Kecamatan Rancaekek memiliki sebuah stasiun kereta api yang dilintasi kereta jurusan Bandung ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sarana pendidikan tersedia lengkap, mulai dari puluhan SD, belasan SMP (empat di antaranya SMPN), beberapa SMA dan SMK, dan sebuah perguruan tinggi (Al Maksum). Bisnis dan industri pun berkembang pesat, terutama pabrik tekstil yang berlokasi di sepanjang Jalan Raya Rancaekek, Sektor pertanian didominasi tanaman pangan, khusunya padi. Selain itu sebagian pesawahan makin tergusur pembangunan perumahan. Di Rancaekek telah berdiri belasan komplek perumahan, yang paling besar ialah Perumnas Bumi Rancaekek Kencana (Buraken).

Sebagaimana beberapa daerah lain di Kabupaten Bandung, Rancaekek menjadi daerah langganan banjir, sehingga mengakibatkan kerusakan pada jalan, pemukiman, industri dan pertanian. Hal lain yang menjadi ciri khas Rancaekek ialah rawan kemacetan.

1. Visi dan Misi

Visi Kecamatan Rancekek adalah “Terselenggaranya Pemerintahan Daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Rancaekek”. Kecamatan Rancaekek juga memiliki 5 butir Misi yang di ampu, diantaranya:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Kecamatan,Desa dan Kelurahan dalam mewujudkan pelayanan prima.
3. Meningkatkan sinergitas dengan SKPD dan Instansi Vertikal lainnya dalam pelaksanaan program pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan.
4. Mewujudkan stabilitas ketentraman dan ketertiban untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.
5. Mengembangkan potensi dan pengelolaan sumberdaya pendapatan asli daerah.

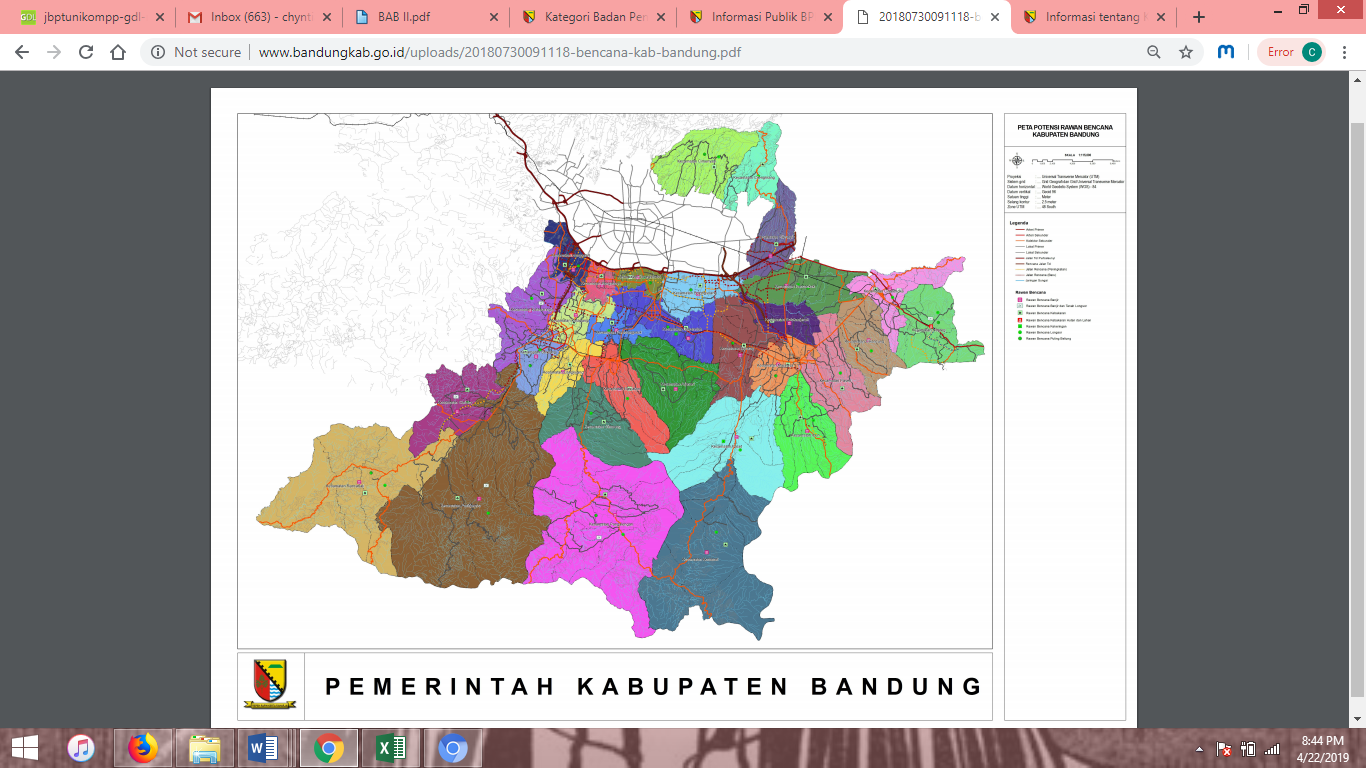
**4.1.4 Potensi Bencana Kabupaten Bandung**

Kabupaten Bandung terdiri dari 31 kecamatan yang berpotensi bencana dengan jenis bencana yang berbeda-beda. Hal tersebut dibahas oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Sudrajat mengatakan Kabupaten Bandung memiliki struktur geografis yang sangat variatif. Terdiri dari dataran tinggi yang berpotensi longsor dan banjir bandang seperti Pangalengan, Kertasari, Ciwidey, Pasirjambu, Cimenyan dan Rancabali. Adapula kawasan cekungan yang rawan banjir seperti Baleendah, Bojongsoang, dan Dayeuhkolot. Setiap kecamatan memiliki potensi bencana dengan jenis yang berbeda-beda seperti longsor, banjir, banjir bandang, angin puting beliung, dan gempa.

Meski semua kecamatan memiliki potensi bencana, namun ada kecamatan dengan tingkatan bencana ringan. Adapula kecamatan yang memiliki tiga potensi bencana sekaligus. Beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung berpotensi atau rawan bencana banjir hingga banjir bandang, di antaranya Kecamatan Majalaya, Solokanjeruk, Rancaekek, Bojonsoang, Baleendah, Dayeuhkolot, Pameungpeuk dan Banjaran. Sementara beberapa kecamatan yang rawan terjadi bencana pergerakan tanah atau longsor di antaranya Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey, Soreang, Cangkuang, Banjaran, Arjasari, Pacet, Ibun, Majalaya, Paseh, Nagreg, Cicalengka, Cileunyi, Cilengkrang, Cimenyan, dan Kutawaringin. Kemudian beberapa kecamatan yang rawan gempa tektonik di antaranya Pangalengan, Kertasari, Pasiejambu, Ibun, Arjasari, Cangkuang, Soreang, Pacet, Ciparay, Baleendah, Ciwidey, dan Kutawaringin. Selain banjir, gempa dan longsor, Kabupaten Bandung juga memiliki kawasan yang rawan lahar gunung api, seperti Kecamatan Rancabali, Pasirjambu, Ciwidey, Pangalengan dan Kertasa

Selain faktor geografis Kabupaten Bandung, cuaca ekstrem juga merupakan salah satu faktor potensi bencana. Cuaca ekstrem adalah fenomena meteorologi yang ekstrem dalam sejarah, khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrem didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrem lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Tipenya sangat bergantung pada Lintang tempat, ketinggian, topografi dan kondisi atmosfer, intensitas lebih dari 1 hari selama periode satu bulan yang melebihi rata-ratanya. Cuaca ekstrem mampu mengakibatkan hujan lebat, hujan es, badai, kekeringan, puting beliung, badai pasir, gelombang tinggi, dan lain-lain. Dilansir dari situs media idntimes, Cuaca ekstrem yang terjadi disebabkan pertemuan masa udara akibat pertemuan monsoon dari Asia dan ada hambatan masa udara selatan yang bertemu di atas pulau Jawa, sehingga beberapa daerah di sekitar Jawa meningkat potensi hujannya.

BPBD melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan bencana di Kabupaten Bandung sebagai bentuk antisipasi bencana, berikut peta rawan bencana di Kabupaten Bandung.



**Gambar 4.3** Peta Rawan Bencana

*Sumber: BPBD Kabupaten Bandung*

BPBD Kabupaten Bandung tentu memiliki konsen terhadap potensi cuaca ekstrem yang terjadi di kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung. Berikut peta cuaca ekstrem yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Bandung

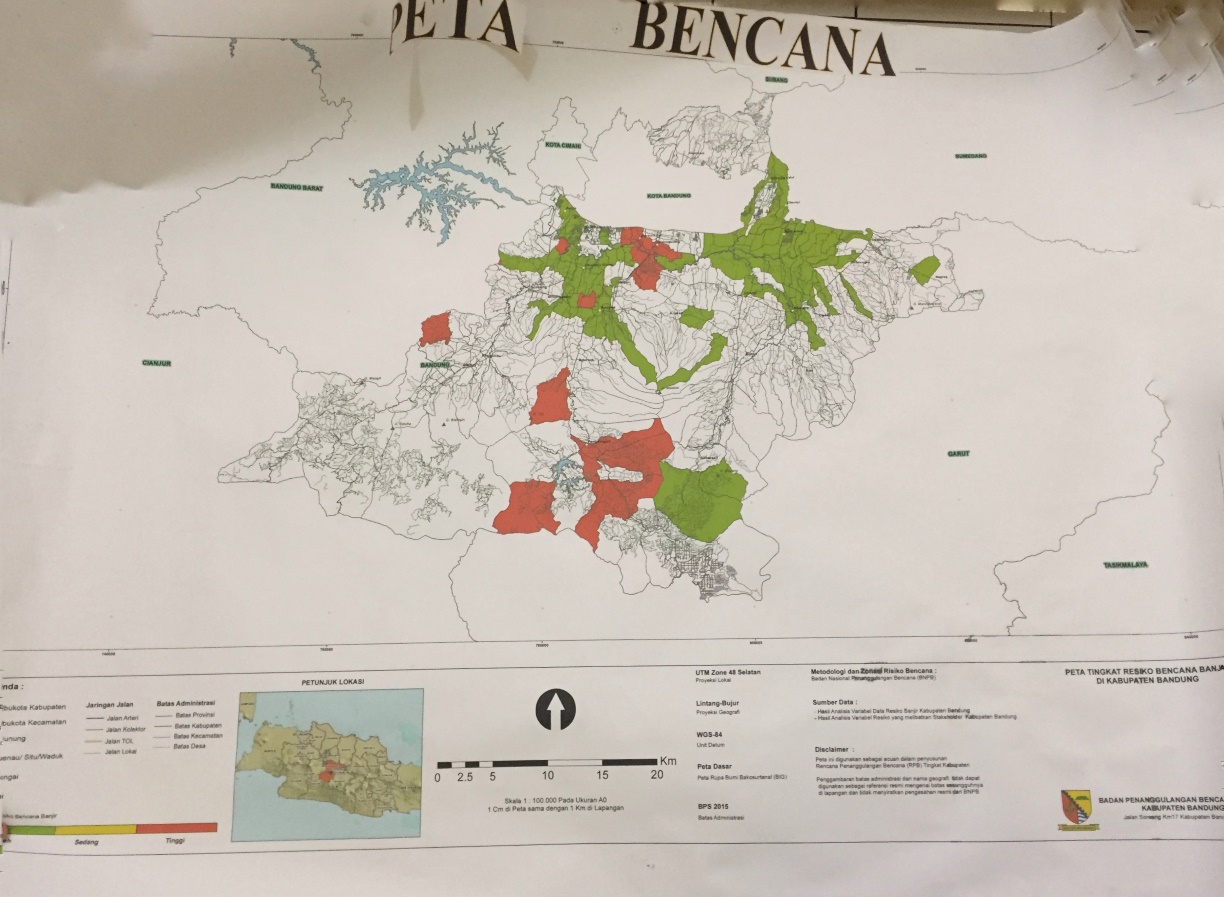


**Gambar 4.4** Peta Cuaca Ekstrem

*Sumber: BPBD Kab. Bandung*

Daerah berwana hijau merupakan wilayah dengan potensi cuaca eksrem yang rendah, sementara warna merah menggambarkan wilayah dengan potensi cuaca ekstrem yang tinggi.

Selain pemetaan akan cuaca ekstrem, BPBD juga melakukan pemetaan terhadap kecamatan-kecamatan Kabupaten Bandung dengan potensi bencana banjir, berikut Gambar 4.5 Peta Bencana Banjir.



**Gambar 4.5** Peta Bencana Banjir

*Sumber: BPBD Kab. Bandung*

Warna hijau mengindikasikan wilayah dengan potensi bencana banjir rendah, sementara warna merah merupakan wilayah dengan potensi bencana banjir tinggi.

* 1. **Pembahasan**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung merancang 8 program untuk tahun kerja 2016-2021, kedelapan program tersebut merupakan hasil dari *Focus Group Discussion* yang diadakan oleh Aparatur BPBD sebagai pertanggungjawaban pada pemerintah Kabupaten Bandung dan masyarakat sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penanganan bencana. Delapan butir program tersebut adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, Program Penanganan Darurat Kebencanaan, dan Program Perbaikan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana. Kedelapan program tersebut memiliki bobot kepentingan yang sama antara satu program dengan program lainnya, saling terintegritas untuk memberdayakan BPBD sebagai upaya optimalisasi kinerja Aparatur. Pada penelitian ini, penulis memilih pokok bahasan Program Penanganan Darurat Kebencanaan sebagai “jantung” dari keseluruhan program yang dicanangkan oleh BPBD untuk tahun kerja 2016-2021, terlebih Kabupaten Bandung memiliki tingkat potensi bencana yang cukup ekstrim.

Pembahasan dibagi menjadi dua bagian, yakni mengenai Implementasi Kebijakan Program dan hambatan serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program. Implementasi kebijakan program mengulas kembali program dengan data yang diperoleh dari wawancara dengan tiga informan Aparatur BPBD Kabupaten Bandung, ketiga informan tersebut adalah Kepala Seksi Kedaruratan, Kepala Seksi Logistik dan Kepala Seksi Kesiapsiagaan sebagai implementator utama kebijakan program tersebut, serta data pendukung berupa studi dokumentasi dan studi literatur. Ulasan program akan di jabarkan dengan pratinjau teori Edward III yakni 4 indikator implementasi kebijakan program, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Implementasi Program Penanganan Darurat Kebencanaan di Kecamatan Rancaekek, bagaimana pandangan masyarakat tentang program tersebut. Studi kasus yang dilaksanakan pada Kecamatan Rancaekek menimbang potensi bencana banjir yang kerap datang serta bencana puting beliung pada Bulan Januari silam yang merupakan bencana dengan skala nasional karena memporak-porandakan ratusan rumah di wilayah kecamatan Rancaekek. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Racaekek, Aparatur Kelurahan Rancaekek Kencana, Aparatur Desa Jelegong, Ketua RW 23 Desa Jelegong, Warga terdampak bencana, Pemudi, Bhabinkamtibmas setempat dan Bhabinsa, elemen-elemen yang terlibat pada saat bencana terjadi. Wawancara dengan delapan informan tersebut dianggap sebagai assessor BPBD Kabupaten Bandung dari implementasi kebijakan progam yang berlangsung di Rancaekek.

Bagian kedua membahas mengenai hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program, hambatan dapat berupa hambatan internal maupun eksternal BPBD Kabupaten Bandung. Selain hambatan, bagian kedua juga membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bandung untuk meminimalisir faktor-faktor yang menjadi hambatan tersebut.

* + 1. **Implementasi Kebijakan Program Penanganan Darurat Kebencanaan**

Program Penanganan Darurat Kebencanaan, pada tahap perencanaannya berfokus tiga kegiatan, ketiga kegiatan tersebut meliputi kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana, kegiatan pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana, kegiatan perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana.

Setelah melakukan *review* program, Program Penanganan Darurat Kebencanaan diimplementasikan dalam 6 butir kegiatan, keenam kegiatan tersebut meliputi:

1) Penyelenggaraan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana alam

2) Kegiatan penanganan pengungsi akibat bencana

3) Pengadaan sarana dan prasarana kedaruratan bencana alam

4) Kegiatan pengembangan aplikasi, teknologi, informasi, komunikasi dan kehumasaan

5) Koordinasi pelaksanaan kedaruratan dan logistik

6) Pengadaan logistik dan obat-obatan kedaruratan bencana alam

Program Penanganan Darurat Kebencanaan memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan cepat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung. Program ini menuntut BPBD untuk dapat menyelenggarakan pencarian penyelamatan dan evakuasi korban Bencana Alam, menciptakan kenyamanan, meminimalisir korban jiwa akibat bencana alam, memenuhi kebutuhan dasar pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, menyelenggarakan kegiatan penangan darurat bencana dengan membentuk dan menyiapkan tim cepat untuk pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana alam serta mampu menyiapkan, menyediakan kebutuhan dasar bagi para pengungsi korban bencana alam.

Selain program yang terencana dengan baik, rekapitulasi anggaran juga merupakan unsur yang penting dalam membangun suatu kebijakan program. Selama tahun kerja 2016-2021, BPBD Kabupaten Bandung melaksanakan tanggap darurat bencana. Pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan puting beliung di Kabupaten Bandung berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 360/Kep.266-BPBD/2016 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Puting Beliung di Kabupaten Bandung, dimulai dari tanggal 13 Maret sampai dengan 19 Maret 2016

Adapun Anggaran biaya kegiatan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Putting Beliung di Kabupaten Bandung bersumber dari BTT APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 1.539.502.500,- dan terealisasi Rp. 1.538.083.709,- atau 99,90%. Dana tersebut digunakan untuk Kebutuhan biaya Mobilisasi, Honorarium Relawan, Belanja Bahan Baku Kegiatan dan Makanan Pengungsi dan Personil.

**Tabel 4.5** Anggaran biaya kegiatan Status Tanggap Darurat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | **Tolak Ukur** | **Kinerja** | |
| **Target** | **Realisasi** |
| Masukan | Tersedianya Dana, SDM, Bahan dan waktu | Rp. 1.539.502.500 | Rp. 1.538.083.709 |
| Keluaran | Terlaksananya upaya tanggap darurat melalui penyediaan Logistik dan Peralatan bagi Pengungsi. | 100% | 99,90% |
| Hasil | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan bantuan logistik bagi korban bencana. | 100% | 99,90% |

*Sumber: LKIP BPBD Kab. Bandung 2017*

Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung di Kabupaten Bandung berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 360/Kep.286-BPBD/2016 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Puting Beliung di Kabupaten Bandung.

Adapun Anggaran biaya kegiatan Perpanjangan Penetapan status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Putting Beliung di Kabupaten Bandung bersumber dari BTT APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 486.550.000,- dan terealisasi Rp. 347.055.000,- atau 71,32%. Dana tersebut digunakan untuk Kebutuhan biaya Mobilisasi, Honorarium Relawan, Belanja Bahan Baku Kegiatan dan Makanan Pengungsi dan Personil.

**Tabel 4.6** Anggaran biaya kegiatan Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | **Tolak Ukur** | **Kinerja** | |
| **Target** | **Realisasi** |
| Masukan | Tersedianya Dana, SDM, Bahan dan waktu | Rp. 486.550.000 | Rp. 347.055.000 |
| Keluaran | Terlaksananya upaya tanggap darurat melalui penyediaan Logistik dan Peralatan bagi Pengungsi. | 100% | 71,32% |
| Hasil | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan bantuan logistik bagi korban bencana. | 100% | 71,32% |

*Sumber: LKIP BPBD Kab. Bandung 2017*

Tanggap Darurat Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung di Kecamatan Cicalengka, Rancaekek, Paseh, Majalaya, Ibun, Pacet, Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Sesuai dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 364/Kep.344-BPBD/2016 tentang Penetapan Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung di Kecamatan Cicalengka, Rancaekek, Paseh, Majalaya, Ibun, Pacet, Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 .

Adapun Anggaran biaya kegiatan Tanggap Darurat Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung di Kecamatan Cicalengka, Rancaekek, Paseh, Majalaya, Ibun, Pacet, Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 bersumber dari BTT APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.1.959.536.200,- dan terealisasi Rp. 1.959.040.200,- atau 100%. Dana tersebut digunakan untuk Kebutuhan biaya Mobilisasi, Belanja peralatan kerja dan kebutuhan pengunggsi, Perbaikan jalan/infrastruktur sementara, Makanan Pengungsi dan Personil dan honorarium relawan.

**Tabel 4.7** Anggaran biaya kegiatan Tanggap Darurat di Wilayah Tertentu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | **Tolak Ukur** | **Kinerja** | |
| **Target** | **Realisasi** |
| Masukan | Tersedianya Dana, SDM, Bahan dan waktu | Rp. 1.959.536.200 | Rp. 1.959.040.200 |
| Keluaran | Terlaksananya upaya tanggap darurat melalui penyediaan Logistik,Peralatan bagi Pengungsi dan perbaikan jalan/infrastruktur sementara. | 100% | 100% |
| Hasil | Terpenuhinya kebutuhan makanan, bantuan logistik bagi korban dan normalnya akses transportasi sementara bagi warga. | 100% | 100% |

*Sumber: LKIP BPBD Kab. Bandung 2017*

Berdasarkan dari data di atas, BPBD tidak menggunakan keseluruhan anggaran yang ditargetkan dalam realisasi program kegiatan tanggap darurat bencana di Kabupaten Bandung. Pada tabel pertama, anggaran yang terealisasi sebesar 99.90%, sementara pada kegiatan perpanjangan penetapan status tanggap darurat, dana hanya terealisasikan sebesar 71,32% dan anggaran untuk kegiatan tanggap darurat di beberapa wilayah dengan potensi bencana tinggi pada Kabupaten Bandung dana yang terealisasi 100% meskipun tidak dalam jumlah yang bulat seluruhnya terealisasikan.

Terlepas dari rekapitulasi anggaran, keberhasilan implementasi kebijakan program juga bergantung pada 4 indikator. Merajuk pada teori Edward III, keempat indikator tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Keempat indikator tersebut dibagi pula kedalam sub-sub indikator, yakni Komunikasi dengan dimensi transmisi, kejelasan dan transmisi. Indikator sumber daya meliputi staff, informasi, wewenang dan fasilitas. Indikator disposisi meliputi dimensi efek disposisi, pengaturan birokrasi dan insentif. Indikator struktur birokrasi meliputi pelaksanaan SOP dan fragmentasi. Berikut pemaparan hasil penelitian yang diperoleh dari data wawancara dengan infoman.

1. Komunikasi

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi atau pentransmisian informasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat.

Pada penelitian ini, komunikasi yang berlangsung di BPBD menentukan tingkat efektivitas implementasi kebijakan program Penanganan Darurat Kebencanaan. Berikut ini analisis dari tiga faktor penentu komunikasi dalam implementasi kebijakan program, yakni sebagai berikut:

1. Transmisi

Transmisi adalah penyaluran komunikasi dalam pelaksanaan Program Penanganan Darurat Kebencanaan guna menghasilkan implementasi yang baik pula. Komunikasi yang telah melalui beberapa tingkatan birokrasi menyebabkan distorsi di tengah jalan. Hal ini berkaitan dengan alur komando pada pelaksanaan penanganan bencana dituntut agar tepat sasaran dan tidak bertele-tele untuk meminimalisir miskomunikasi yang berdampak bagi keberlangsungan pelaksanaan.

Berdasarkan hasil temuan dengan Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung sebagai *Key Informan*, yaitu:

“Ketika ada info bencana masuk ke pusat penanggulangan informasi/humas, BPBD memiliki radio untuk komunikasi dengan kecamatan untuk bantu perihal kebencanaan. Jadi, ketika ada info dari pihak kecamatan, maka yang pertama maju adalah dari bagian kedaruratan untuk *assesment*.”

Transmisi pesan mengenai info kebencanaan merupakan hal terpenting dari pelaksanaan program, sebagaimana hal tersebut dijelaskan kembali dalam jawaban wawancara Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Rancaekek yang menyatakan tindakan pertama yang dilakukan oleh pihak kecamatan ketika ada bencana, yaitu:

“Koordinasi dengan BPBD kabupaten bandung penanganan bencana dilaksanakan oleh panitia perdesa. pihak kecamatan melakukan pendataan lanjutan dari desa untuk melakukan koordinasi dengan pihak BPBD kabupaten, pendataan meliputi korban, bangunan yang rusak, kebutuhan sarana dan prasarana.”

Transmisi pesan berupa *encoding* dari komunikator yang diterima berupa *decoding* dari komunikan menyatakan keberhasilan komunikasi yang terjalin antar kelompok karena transmisi pesan berlangsung 2 arah dan tidak melibatkan pihak lain sehingga kemungkinan miskomunikasi mampu diminimalisir oleh kedua pihak yang saling berkoordinasi dalam memberikan informasi kebencanaan.

Pernyataan keduanya menyiratkan bahwa koordinasi merupakan *output* dari transmisi pesan yang menetukan efektivitas pelaksanaan program. Tidak hanya berhenti sampai di kedua pihak tersebut, koordinasi juga dilakukan oleh pihak desa dan kelurahan kepada kecamatan untuk memberi kejelasan data, seperti yang diungkapkan oleh Aparat Kelurahan Rancaekek Kencana saat ditanya mengenai bagaimana pihak Kelurahan memberikan informasi terjadi bencana kepada kecamatan, berikut penuturannya:

“(Kami) melakukan konfirmasi dengan pihak kecamatan, kecamatan yang langsung menghubungi BPBD.”

Jawaban tersebut selaras dengan hal yang dikemukakan oleh Aparat Desa Jelegong, yaitu:

“Kordinasi dengan kecamatan untuk kordinasi dengan pihak lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD, Polisi, TNI.”

Koordinasi dilakukan secara bertahap dengan penyampaian pesan atau informasi bencana sesuai hierarki struktur kepengurusan dalam birokrasi.

Selain koordinasi pada tahap awal informasi bencana disampaikan, transmisi pesan pun berperan pada proses sosialisasi yang juga termasuk dalam pelaksanaan program. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung sebagai upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB), beliau menyebutkan bahwa:

“Sosialisasi bencana pada masyarakat hanya dilakukan di beberapa desa, dalam satu desa pun tidak semua warga dapat diikutsertakan karena keterbatasan anggaran dan jumlah warga yang banyak.”

Hal serupa mengenai sosialisasi bencana juga ditanggapi oleh Pemudi setempat, berikut jawabannya:

“Sampai sekarang belum pernah ada sosialisasi tentang kebencanaan.”

Jumlah warga yang lebih banyak dari aparat pelaksana sosialisasi bencana merupakan contoh potensi munculnya distorsi pesan, di mana pesan utama (sosialisasi bencana) hanya disampaikan kepada segelintir orang dan informasi seterusnya bisa saja terhenti sampai kelompok tersebut, atau jika terus disampaikan akan menuai *output* yang berbeda karena gangguan pesan yang disampaikan di tengah jalan. Hal tersebut dibuktikan oleh tanggapan dari Pemudi di mana ia tidak mendapatkan sosialisasi mengenai kebencanaan dari pihak BPBD.

1. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

Kejelasan tidak hanya menyoal penyampaian pesan, tetapi juga konstruksi pesan itu sendiri, pesan harus sesuai dengan karakter dan kapasitas penerima pesan untuk menghindari kesalahpahaman atas informasi yang disampaikan. Hal ini berkaitan dengan pengarahan pihak-pihak pelaksana yang terlibat, kejelasan pesan merupakan inti dari instruksi yang disampaikan. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bandung menjawab isu kejelasan dalam penyampaian arahan sebagai berikut:

“Melaksanakan apel dan penjelasan mengenai laporan (data bencana) sebelum turun ke lokasi bencana, serta menjelaskan dengan pembahasan tim yang terlibat seperti keterlibatan Polisi, TNI dan relawan. Lalu mengerahkan persiapan pelaksanaan teknis (situasional).”

Pengarahan yang dilakukan oleh pihak Kedaruratan sebagai *assessor* kepada tim pelaksana yang terjun ke lokasi dituntut harus serinci mungkin, maka apel yang dilaksanakan membahas data dampak bencana juga keterlibatan instansi lain agar berjalan dengan baik. Dalam hal ini, koordiansi teknis merupakan *output* dari kejelasan komunikasi yang baik antara pihak Kedaruratan dengan tim BPBD yang turun ke lokasi.

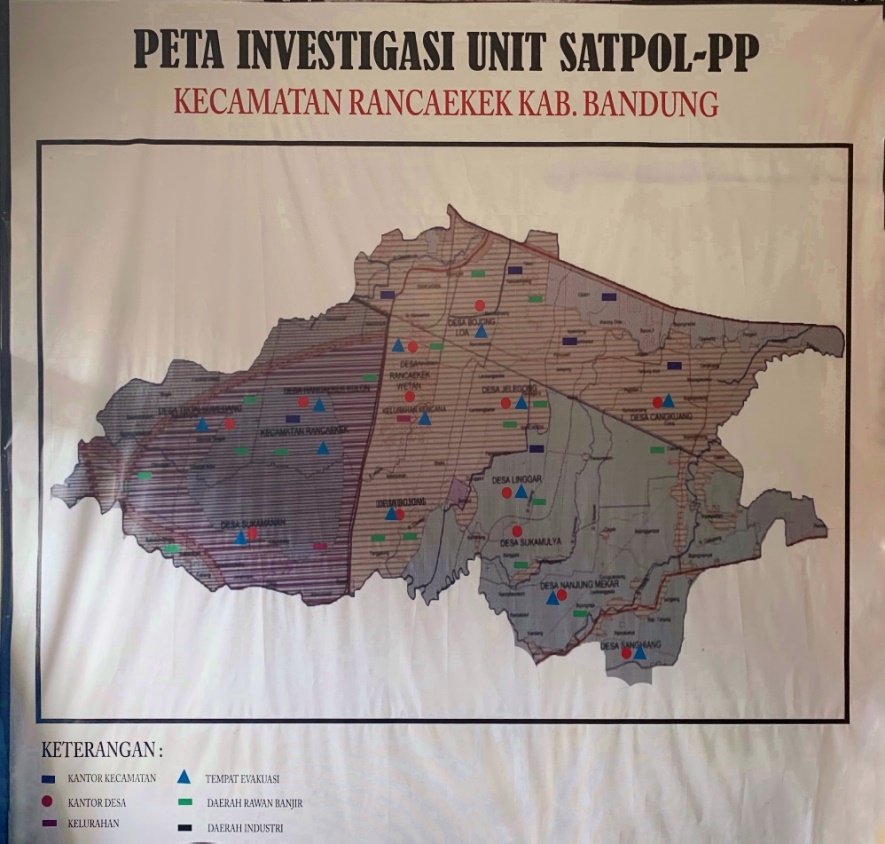
Selain pengarahan pada tim pelaksana, kejelasan dalam komunikasi juga harus ditegaskan kepada masyarakat. Masyarakat harus diedukasi mengenai bencana untuk mempersiapkan mereka pada potensi bencana yang tidak dapat diprediksi. Kejelasan informasi merupakan konstruksi bagaimana pemahaman komunikan dibangun, dalam hal sosialisasi bencana, kesadaran masyarakat dan pemahaman mereka adalah sesuatu yang harus diupayakan oleh sang komunikator atau pihak penyampai informasi, seperti yang disampaikan oleh Ketua Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung berikut:

“Sosialisasi bencana membahas tentang dasar hukum tentang bencana juga pengertian dan pemahaman tentang bencana. Teknis dan kewilayahan mengajak serta badan vulkanologi. Sosialisasi bencana membahas umum bencana tidak spesifik (contoh: sosialisasi banjir, longsor, dll)”

Arahan mengenai bencana secara teknis dan kewilayahan mampu mengedukasi masyarakat untuk melaksanakan tindakan penanganan pertama sebelum BPBD sampai di lokasi bencana, materi tentang hal apa saja yang perlu diketahui tentang bencana itu sendiri secara umum, hal tersebut disetujui oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Rancaekek yang juga merangkap profesi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penanggungjawab kebencanaan tingkat kecamatan, berikut pernyataannya:

“BPBD beserta Dinas Sosial melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai bencana, Satpol PP dan Linmas dilibatkan dalam pelatihan teknis.”

Pada tingkat kecamatan, kejelasan informasi teknis dan kewilayahan bencana ini mendapat *output* baik, di mana kecamatan mampu mempersiapkan hal-hal terkait penanganan bencana, seperti mempersiapkan peta investigasi unit Sapol-PP berikut



**Gambar 4.6** Peta Investigasi Unit Satpol-PP

*Sumber: Kecamatan Rancaekek*

Pada peta tersebut, Kecamatan Rancaekek memberikan simbol persegi hijau bagi wilayah rawan banjir di kecamatan beserta symbol segitiga biru bagi tempat evakuasi bencana. Tempat evakuasi bencana terletak di setiap titik kantor desa yang diberi simbol bulat merah dan kantor kelurahan yang diberi simbol persegi ungu. Persiapan Kecamatan Rancaekek dinilai matang dalam kesiapsiagaan bencana di mana BPBD juga turut andil dalam penyampaian sosialisasi bencana dengan kejelasan informasi yang optimal.

Kejelasan informasi pada sosialisasi bencana juga berdampak pada tingkat kesiapan warga dalam menghadapi bencana, berikut penuturan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mengenai hal tersebut:

“Warga dinilai responsif dalam menghadapi bencana terutama dalam menghadapi banjir yang merupakan bencana yang rutin terjadi di kecamatan Rancaekek.”

Responsivitas warga dalam menghadapi bencana membuktikan kejelasan informasi pada sosialisasi bencana yang dilakoni BPBD mampu mengedukasi warga, hal serupa juga dikatakan oleh Aparatur Desa Jelegong yang mengatakan:

“Kesiapan warga setelah adanya bencana putting beliung menjadi lebih waspada karena takut adanya bencana susulan, karena putting beliung bukan pertama kali terjadi pada tahun 2011 pun pernah terjadi tetapi tidak separah yang sekarang”

Bencana puting beliung pada tahun 2011 tentunya sudah diantisipasi kembali oleh pihak BPBD dengan mengedukasi warga dalam sosialisasi bencana putting beliung, warga dibekali ilmu dalam mempersiapkan diri sehingga menjadi lebih waspada pada saat adanya puting beliung pada Januari silam. Hal serupa lainnya mengenai kesiapan warga juga dikemukakan oleh Aparatur Kelurahan Rancaekek Rencana sebagai berikut:

“Organisasi warga yang membantu sesama warga membantu memberikan bantuan. Saat bencana puting beliung terjadi beberapa warga melakuka rekonstruksi bangunannya sendiri.”

Sesama warga mampu mengorganisir penanganan bencana merupakan keberhasilan tertinggi dari kejelasan informasi yang disampaikan pada sosialisasi bencana. Kesiapan warga dalam menghadapi bencana juga dikomentari oleh pihak warga sendiri, yakni Ketua RW 23 Desa Jelegong, berikut pemaparannya:

“Warga spontan berlarian menghindari arah angin. Pada bencana puting beliung Tahun 2015 warga mengusir angin dengan cara tradisional leluhur.”

Hal yang disampaikan oleh Ketua RW menguak sisi ketidakberhasilan penyampaian informasi dalam melakukan komunikasi, di mana warga masih percaya dengan tradisi leluhur tentang bagaimana cara mengusir angin, tanda kejelasan informasi belum secara optimal tersampaikan menyeluruh.

Pemudi di Kecamatan Rancaekek juga menambahkan tanggapan mengenai kesiapan warga dalam menghadapi bencana, berikut penuturannya:

“Kesigapan masyarakat sendiri harus sadar akan bencana yang terjadi meskipun belum ada sosialisasi dari pihak terkait, masyarakat pun harus ikut seta membantu dalam penanganan bencana yang terjadi di rancaekek.”

Hal tersebut juga berkaitan dengan transmisi pesan yang sebelumnya dibahas, sosialisasi hanya disampaikan kepada segelintir masyarakat yakni Aparatur Desa Jelegong dan Aparatur Kecamatan Rancaekek sehingga kelanjutan penyampaian informasi kepada warga menjadi terhambat karena adanya *noise* ditengah jalan. Gangguan tersebut dapat berupa rendahnya kejelasan informasi yang disampaikan oleh Aparatur Desa dan Kecamatan terhadap warga, di mana bukan merupakan wilayah pertanggungjawaban BPBD.

1. Konsistensi

Konsistensi merupakan perintah yang diberikan dalam pelaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Penyampaian pesan baik informasi maupun perintah pada BPBD Kabupaten Bandung menentukan kelangsungan program mampu dilaksanakan secara optimal, maka pesan yang koheren dari waktu ke waktu harus diterapkan untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan penanganan bencana. Pada penanganan bencana, konsistensi berkaitan erat dengan prosedur pelaksanaan serta aparat yang melakukan penanganan bencana, berikut jawaban dari Kepala Seksi Kedaruratan BPBD mengenai hal tersebut:

“(secara prosedural) Kami mendata korban dan sarana maupun prasarana apa yang dibutuhkan di lokasi bencana, setelah itu melakukan pendataan untuk laporan. Pihak BPBD kembali ke lokasi bencana untuk membawa logistik yang berkaitan dengan penanggulangan bencana tsb.”

Beliau juga menambahkan bagaimana konsistensi tindakan Aparatur terhadap prosedur tersebut:

“(pada pelaksanaan lapangan) Aparat melakukan koordinasi secara spontan dengan pelaksanaan apel siaga ketika ada bencana. SOP yang dilakukan sesuai dengan penanganan bencana (banjir/longsor/bencana lain)”

Spontanitas Aparatur dalam pelaksanaan dilapangan serta kesesuaian tindakan penanganan berdasarkan bencana yang terjadi merupakan bentuk konsistensi dalam penanganan bencana, pelaksanaan apel siaga juga memberdayakan Aparatur dengan perintah-perintah tertentu yang sesuai dengan orientasi bencana untuk melakukan tindakan penanganan, BPBD tidak boleh semena-mena melaksanakan tugasnya tanpa ada perintah yang pasti, hal ini berkaitan dengan kejelasan infomasi yang disampaikan dengan komando.

Konsistensi pelaksanaan yang terjadi berdampak pada ketanggapan BPBD dalam penanganan bencana, seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Rancaekek berikut:

“Estimasi BPBD datang ke lokasi bencana memakan waktu yang singkat, begitu informasi masuk langsung datang ke lokasi bencana sebelum pelaporan data secara formal diberikan.”

Jawaban tersebut merupakan bukti konkret bahwa konsistensi pelaksanaan program sesuai prosedur mampu dilaksanakan oleh BPBD, karena estimasi waktu yang singkat serta ketanggapan BPBD turun ke lapangan. Hal serupa dinyatakan oleh Aparatur Desa Jelegong yang menjawab:

“BPBD tanggap dalam penanganan puting beliung, langsung melakukan evakuasi ke lokasi juga untuk pendataan logistik yang diperlukan, rekontruksi sendiri dilakukan sehari setelah bencana.”

Tanggapan Aparatur seperti yang dinyatakan di atas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pihak Kepala Seksi Kedaruratan BPBD sebelumnya, artinya BPBD konsisten dalam memberikan arahan kepada tim pelaksana sesuai dengan orientasi bencana yang terjadi di lapangan. Opini serupa lainnya datang dari Ketua RW 23 beseta warga Desa Jelegong saat ditanyai perihal ketanggapan BPBD, berikut jawabnya:

“Penanganan dari pemerintah cepat tanggap karena bencana putting beliung kemarin merupakan bencana skala nasional.”

Jawab Ketua RW 23 Desa Jelegong dengan menyorot bencana putting beliung Januari silam sebagai bencana nasional. Sedangkan, Warga RW 23 menjawab demikian:

“BPBD langsung datang ke lokasi beserta TNI dan Polri juga mobil-mobil ambulans (Dinas Kesehatan) dan orang-orang pemerintahan lainnya. Utamanya BPBD yang langsung melakukan evakuasi korban.”

Lain halnya dengan apa yang di utarakan oleh Aparatur Kelurahan Rancaekek Kencana, beliau mengatakan bahwa:

“BPBD hanya memberikan bantuan setelah data diserahkan dan koordinasi berlangsung.”

Keterlambatan penyaluran bantuan terjadi di Kelurahan Rancaekek Kencana pada penanganan bencana banjir. Meskipun demikian, BPBD tetap melakukan survey dan pendataan serta koordinasi dengan Aparatur kelurahan setempat, konsistensi BPBD tetap berjalan.

Ketanggapan BPBD dalam penanganan bencana juga diberi komentar oleh pihak Pemudi setempat, berikut penuturannya:

“Untuk bencana yang tergolong berat pihak bpbd maupun kecamatan pasti tanggap dan sigap terhadp bencana yang terjadi Respon dari pemerintah cukup tanggap dalam masalah bencana karena hubungannya dengan kemanusiaan.”

Skala bencana merupakan pertimbangan dalam ketanggapan penanganan darurat kebencanaan, namun setiap bencana tetap diperlakukan sama gentingnya dalam penanganan karena tugas yang dijalankan oleh BPBD adalah tugas kemanusiaan.

1. Sumber Daya

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM) yang mencukupi, memadai dan kompeten dibidangnya. Dalam implementasi kebijakan, sumber daya melibatkan informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Hal lainnya adalah kewenangan yang bersifat formal, otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Dimensi terakhir adalah fasilitas sebagai sarana dan prasarana pelengkap.

1. Staf

Staf atau pegawai atau aparatur merupakan elemen penggerak sebuah organisasi untuk terus melakukan kinerja-kinerja baik yang berguna bagi organisasi maupun pihak eksternal berupa publik dan organisasi lain. Staf merupakan kekuatan sumber daya manusia yang dituntut untuk kompeten dan memiliki kapabilitas yang mumpuni dengan orientasi, program kerja serta tujuan organisasi tersebut. Maka, rekrutmen sumber daya manusia bagi suatu organisasi tidak bisa semena-mena, staf juga perlu diberikan pelatihan terkait tugas kerja yang diampunya.

Pada pelaksanaan program Penanganan Darurat Kebencanaan, dimensi staf ini diwakili oleh Aparatur yang terintegrasi dalam Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Kriteria Aparatur yang memiliki kapabilitas untuk turun ke lapangan dalam melakukan penanganan bencana tentu menjadi isu pokok sumber daya manusia di BPBD. Mengenai hal tersebut, Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bandung memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Petugas atau tim pelaksana yang turun ke lapangan atau lokasi bencana haruslah memiliki pengalaman dan kecakapan dalam menangani korban, yakni petugas yang telah melaksanakan pendidikan latihan dan bimbingan teknis.”

Dari pernyataan di atas, BPBD sudah memperhatikan kemampuan Aparatur nya dengan memberikan pelatihan bagi tim pelaksana penanganan bencana. Selain Aparatur BPBD yang memiliki wewenang utama dalam pelaksanaan penanganan bencana, BPBD juga bertanggungjawab untuk membekali pihak-pihak yang terlibat dengan pelatihan teknis, seperti perwakilan kecamatan, desa dan kelurahan serta relawan yang bersedia melakukan pelatihan tersebut sebagai upaya pemberdayaan sumber daya manusia yang bersifat eksternal.

1. Informasi

Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenahi bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Informasi pada program Penanganan Darurat Kebencanaan berkaitan dengan macam pelatihan yang diberikan oleh pihak BPBD kepada tim pelaksana, Kepala Seksi Darurat BPBD menanggapi demikian:

“Pelatihan profesional yang berlaku bagi para petugas serta relawan dengan bantuan dari KODAM 3 Siliwangi dan Sipur di wilayah pegunungan selama 2 minggu diklat untuk relawan dilaksanakan satu kali dalam setahun secara frekuentif.”

Ketersediaan informasi bagi pelaksana tugas dengan pelaksanaan pendidikan latihan dan bimbingan teknis berdampak pula bagi warga terdampak bencana, informasi bagi SDM memberikan *output* bagaimana BPBD bertindak saat menangani bencana. Berikut penuturan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban:

“BPBD langsung melakukan evakuasi dan distribusi bantuan kepada masyarakat. Juga membangun prasarana lain seperti tenda pengungsian dan dapur umum jika diperlukan.”

Tindakan yang cepat tanggap dalam melakukan evakuasi dan penyaluran bantuan bagi korban terdampak bencana merupakan hasil dari pelatihan yang diberikan pada tim pelaksana. Adapula respon serupa dari Aparatur Desa Jelegong berikut:

“Pihak BPBD bersama tagana langsung melakukan evakuasi setelah informasi diterima, untuk selanjutnya melakukan penanganan dan pendataan.”

Tindakan BPBD di lapangan juga mendapat tanggapan dari Aparatur Kelurahan Rancaekek Kencana berikut:

“BPBD melakukan upaya evakuasi dan menyalurkan bantuan secara merata; setelah mendata bahan (material) untuk kerusakan, data diserahkan pada BPBD untuk bantuan, bantuan sampai ke kelurahan. Saat puting beliung terjadi, bantuan yang disalurkan berupa makanan dan material bangunan.”

Tindakan BPBD pada penanganan bencana putting beliung juga diberi tanggapan serupa oleh Ketua RW 23 Desa Jelegong di mana putting beliung meninggalkan dampak terbesar di wilayah tersebut, berikut penuturannya:

“Bantuan ada kebanyakan asbes dan genting, ada juga pembentukkan posko dan dapur umum yang dibentuk BPBD dengan melibatkan TNI, Polri dan Ormas.”

Pendapat lainnya juga datang dari warga terdampak bencana puting beliung, berikut ungkapan beliau mengenai tindakan BPBD di lapangan saat bencana terjadi:

“Evakuasi korban luka langsung dilarikan ke RS, mendirikan tenda pengungsian dan dapur umum. BPBD juga memberikan bantuan berupa materi dan makanan jadi sama makanan mentah (sembako).”

Selain tindakan tersebut di atas, upaya evakuasi yang dilaksanakan oleh BPBD juga merupakan hasil atau *output* dari informasi semasa pelatihan atau diklat dan bimtek yang diterapkan pada tim pelaksana, berikut penuturan Aparatur Desa Jelegong berikut:

“Korban luka seperti patah tulang, luka di kepala karena tertimpa genting langsung di rujuk ke Rumah Sakit.”

Keterampilan tim pelaksana juga tidak hanya di uji pada upaya evakuasi, namun juga dalam pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi, berikut pemaparan Kepala Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung:

“Pemerintah melakukan rekonstruksi dalam pencegahan bencana banjir lanjutan untuk meminimalisir resiko.”

Aparatur Kelurahan Rancaekek Kencana juga menambahkan tanggapannya terhadap upaya rekonstruksi dan rehabilitasi BPBD, berikut pemaparannya:

“Penanganan bencana banjir tidak mendapatkan perhatian serius dari BPBD. Saat puting beliung terjadi beberapa warga langsung merekonstruksi bangunan rumahnya. Bangunan yang mengalami rusak parah seperti posyandu dibenahi oleh warga sendiri dengan cara gotong royong. BPBD hanya menyalurkan banturan berupa material yang bersifat darurat seperti terpal.”

Aparatur Kelurahan Rancaekek Kencana menambahkan bahwa basis ekonomi warga disana adalah menengah keatas, hal itulah yang menyebabkan warga merekonstruksi bangunannya dengan biaya sendiri, bantuan terpal sebagai penutup atap darurat tidak terpakai di Kelurahan Rancaekek Kencana. Namun, BPBD tetap mengupayakan rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan. Hal lain dikemukakan oleh Aparatur Desa Jelegong yang berkata demikian:

“Bantuan dari berbagai instansi dan pihak lain (Developer perumahan) juga turun ke lokasi selama 1 minggu bersama warga gotong royong melakukan rekonstruksi.”

Ketua RW 23 Desa Jelegong juga menambahkan:

“*Trauma healing* bagi anak-anak dari BPBD Dinsos dan relawan. BPBD tetap melakukan kontrol selama satu minggu setelah bencana putting beliung, karena warga kembali kerumah masing-masing”

Kontrol yang dilakukan oleh BPBD merupakan bukti kesungguhan BPBD dalam melaksanakan tugasnya, terlebih pada rekonstruksi dan rehabilitasi karena dilakukan pasca bencana.

Keseragaman jawaban atas tindakan BPBD di lapangan merupakan bukti bahwa informasi pelaksanaan penanganan bencana yang diberikan BPBD pada tim pelaksana dalam bentuk pendidikan latihan dan bimbingan teknis sudah optimal dilaksanakan, pemberdayaan Aparatur pelaksana memiliki tanggapan positif dari warga dan Aparatur kecamatan, desa dan kelurahan.

Di sisi lain, informasi yang tidak lengkap dalam penyampaiannya mampu menghadirkan kendala pada tim pelaksana, berikut penuturan Kepala Seksi Kedaruratan mengenai hal tersebut:

“Kendala utama adalah cuaca (secara teknis), tetapi koordinasi yang telah dialakukan sebelumnya, (cuaca) tidak menjadi hambatan.”

Hal tersebut menyiratkan bahwa pelatihan teknis yang diberikan pada tim pelaksana belum cukup membekali mereka kiat-kiat bagaimana menghadapi potensi cuaca yang buruk. Perkara lain juga dikemukakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan penanganan bencana seperti Polisi dan TNI, berikut penuturan dari Bhabinkamtibmas:

“Kendala hanya ada satu posko bencana yang menyebabkan cemburu sosial pada RW lain diluar desa jelegong karena bantuan terpusat hanya pada posko yang terdapat di RW 23 desa jelegong. Penyebabnya adalah kurang koordinasi karena pada hari H kejadian tidak ada koordinasi menyeluruh namun per masing-masing tim.”

Kurangnya koordinasi dalam penanganan bencana dengan pihak lain yang terlibat merupakan dampak dari informasi yang belum maksimal dalam penyampaiannya. Hal serupa juga ditanggapi oleh Bhabinsa setempat, berikut jawabannya:

“Kendala hanya sebatas kurangnya koordinasi saat hari pertama bencana karena semuanya sibuk dengan tim masing-masing, kerja tanggap untuk meminimalisir jumlah korban.”

Kekurangan informasi pada tahap pendidikan latihan dan bimbingan teknis berdampak bagi sesama pihak yang turut melakukan penanganan bencana.

Selain data yang diperoleh dari informan wawancara di atas, peneliti juga melakukan studi dokumentasi sebagai data pendukung dimensi informasi. Kelengkapan Informasi BPBD juga merupakan hal penting dalam proses penanganan bencana. Ringkasan isi informasi mampu menjadi bahan acuan dalam penanganan becana kedepannya. Informasi yang bersifat publik tersebut dimiliki oleh pihak BPBD, informasi tersebut juga di rangkum pada tabel daftar informasi publik berikut:

**Tabel 4.8 Informasi Publik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Ringkasan Isi Informasi** | **Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi** |
|
| A | **Informasi tentang Profil Badan Publik** |  |
| 1 | Struktur Organigram BPBD 2017 | Umum Kepegawaian |
| 2 | Tugas Pokok dan Fungsi BPBD | Umum Kepegawaian |
| 3 | SK PPID Pembantu | Umum Kepegawaian |
| 4 | Peta Jabatan BPBD Tahun 2017 | Umum Kepegawaian |
| B | **Informasi tentang Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan** |  |
| 1 | Matriks Renstra BPBD 2016-2021 | Penyusunan Program |
| 2 | Renja 2017 | Penyusunan Program |
| 3 | Rekap Program yang telah dilaksanakan | Penyusunan Program |
| 4 | RUP 2017 | Penyusunan Program |
| 5 | Rencana Aksi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahun 2016 & 2017 | Penyusunan Program |
| 6 | Laporan Tahunan TA 2016 | Penyusunan Program |
| **C** | **Informasi tentang Kinerja** |  |
| 1. | LAKIP 2017 | Penyusunan Program |
| **D** | **Informasi tentang Laporan Keuangan** |  |
| 1 | Laporan Realisasi Anggaran BPBD Tahun 2017 | Keuangan |
| 2 | Rekap Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 | Keuangan |
| 3 | RKA 2017 | Keuangan |
| 4 | Rekap DPA 2017 | Keuangan |
| **E** | **Informasi dan/atau tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat dan/atau berdampak bagi Publik** |  |
| 1 | Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 | Umum Kepegawaian |
| 2 | Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 | Umum Kepegawaian |
| 3 | Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2010 | Umum Kepegawaian |
| 4 | Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 | Umum Kepegawaian |
| 5 | Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 | Umum Kepegawaian |
| 6 | Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2010 | Umum Kepegawaian |
| 7 | Peraturan Kepala BNPB tentang PUSDALOPS-PB | Umum Kepegawaian |
| 8 | Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2014 | Umum Kepegawaian |
| 9 | Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2011 | Umum Kepegawaian |
| **No** | **Ringkasan Isi Informasi** | **Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi** |
| **F** | **Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa** | Kasubag Program |
| **G** | **Informasi tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Setiap Kantor Badan Publik** | Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan |
| **1** | **Peta Risiko Bencana** | Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan |
|  | Peta Risiko Bencana Banjir |
| Peta Risiko Bencana Tanah Longsor |
| **2** | **Peta Bahaya Bencana** | Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan |
|  | Peta Bahaya Banjir |
| Peta Bahaya Longsor |
| **3** | **Peta Bahaya Perkecamatan** | Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan |
| **4** | **Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana** |
|  | Kesiapsiagaan Banjir |
| Kesiapsiagaan Longsor |
| **5** | **Mekanisme Tanggap Darurat** | Bidang Kedaruratan dan Logistik & Pusdalops |
| **6** | **SKPD yang berada dibawah Koordinasi BPBD** |
| **H** | **Informasi Kejadian Bencana** |
| 1 | Rekap Kejadian Bencana Januari s/d Maret Tahun 2017 |
| 2 | Rekap Kejadian Bencana Tahun 2016 |
| 3 | Rekap Kejadian Banjir Tahun 2016 |
| 4 | Rekap Kejadian Bencana Banjir s/d Maret 2017 |
| 5 | Rekap Kejadian Bencana Putting Beliung |
| 6 | Rekap Kejadian Putting Beliung 2016 |
| 7 | Rekap Kejadian Longsor |
| 8 | Rekap Kejadian Bencana Longsor |
| 9 | Rekap Kejadian Bencana Rumah Ambruk |
| 10 | Rekap Kejadian Bencana Kebakaran |
| 11 | Rekap Kejadian Bencana Kekeringan |
| 12 | Dampak Bencana Tahun 2016 |
| 13 | Data Kejadian Bencan Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung |
| 14 | Laporan Kejadian Bencana (Tanggap Darurat Bencana) |

*Sumber: LKIP BPBD Kab. Bandung 2017*

1. Wewenang

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan.

Wewenang dapat berasal dari internal instansi maupun eksternal (melibatkan instansi lain) dalam pelaksanaan program. Kewenangan dalam BPBD tentu berjalan sesuai strukrur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Namun, kewenangan ini juga mampu dipengaruhi oleh faktor lain dalam kebijakan pelaksanaan program penanganan darurat kebencanaan, berikut penuturan Kepala Seksi Logistik:

“Potensi keparahan bencana yang sudah tidak dapat ditangani oleh kecamatan dll, serta tingkat pengungsi untuk peningkatan status bencana.”

Kedua faktor tersebut mampu mempengaruhi wewenang yang berlangsung di BPBD. Selain kedua faktor tersebut, kewenangan dipengaruhi oleh keterlibatan instansi lain dan koordinasi yang berlangsung antara BPBD dengan pihak-pihak tersebut. Seperti yang diutarakan oleh Kepala Seksi Kedaruratan berikut:

“BPBD melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PMI, BASARNAS, Polisi, TNI, relawan, pihak kecamatan termasuk Satpol PP.”

Koordinasi dengan instansi-instansi lain juga terjalin, berikut pemaparan beliau mengenai hal tersebut:

“Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk pengungsi. Kemitraan dengan Dinas Sosial, PMI, BASARNAS. Semua pihak membantu proses evakuasi korban, Dinas Sosial dan relawan juga mengerahkan bantuan berupa *trauma healing* serta proses distribusi bantuan kepada korban bencana.”

Koordinasi yang berjalan antara BPBD dengan instansi-instansi lain dapat mengoptimalkan kinerja penanganan bencana, di mana banyaknya tangan yang membantu mampu mempercepat kegiatan evakuasi maupun penyaluran bantuan pada warga terdampak bencana. Koordinasi tersebut juga dijelaskan kembali oleh pihak terlibat seperti Polisi dan TNI. Berikut pemaparan dari Bhabinkamtibmas mengenai teknis pelaksanaan koordinasi dengan BPBD:

“Apel diadakan di posko saat akan melakukan rekonstruksi terpusat di posko bencana bersama dengan instansi lain, koordinasi hanya berlangsung di posko untuk kepentingan distribusi bantuan dan pembagian tugas untuk rekonstruksi.”

Hal serupa perihal koordinasi antara BPBD dengan instansi lain yang terlibat juga dikatakan oleh Bhabinsa setempat, Bhabinsa juga membantu proses penanganan bencana, berikut pemaparan beliau mengenai teknis koordinasi yang mereka jalankan:

“Pembagian tugas di koordinasikan saat Apel dekat posko bencana, kita bantu membangun ulang rumah-rumah yang rusak juga mendistribusikan bantuan kepada warga setempat berdasarkan tingkat urgensi nya.”

Wewenang yang dimiliki BPBD dalam penanganan bencana tidak sepenuhnya mutlak diampu oleh BPBD, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penanganan bencana seperti yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Logistik, serta keterlibatan instansi lain dalam pelaksanaan program yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Kedaruratan, keterlibatan instansi-instansi tersebut juga dijabarkan dalam koordinasi teknis yang disampaikan oleh Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas.

1. Fasilitas

Fasilitas merupakan bagian dari Sumber Daya merupakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program, fasilitas yang harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Persentase bantuan logistik dan peralatan untuk kebutuhan korban bencana didukung 2 kegiatan yaitu Kegiatan Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan Pengungsi tercapai 70,64% dari target 100% pada tahun 2016, di 2015 tercapai sebanyak 98% menurun 27,36% dan Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam tercapai 74,26% dari target 100%, sarana prasarana dimaksud yaitu:

|  |  |
| --- | --- |
| * IO Modul APCH * Life detector * Chain Shaw * Rak Perahu * Toilet Mobile * Breathing Apparatus * Flexible Buoy * Torpedo Buoy * Kit Tas Kebencanaan * Spare Part Drone * Jaws Of Life * Genset | * Light Tower * Mesin Fogging * Family kit, (tas family kit, handuk, senter, P3K, pasta gigi, sabun mandi cair, sikat gigi, shampo, pembalut) * terpal (4x6), * Tikar * Selimut * karung plastik (50 kg) * singkup * cangkul |

Fasilitas pada program penanganan darurat kebencanaan meliputi sarana dan prasarana untuk melakukan evakuasi seperti pelampung, perahu, pelindung kepala dan lutut, dan sebagainya. Serta bahan baku rekonstruksi, obat-obatan, perlengkapan darurat, bahan makanan, dll. Kelengkapan tersebut merupakan fasilitas penunjang keberlangsungan program. Mengenai kelengkapan fasilitas tersebut, Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kab. Bandung memiliki jawaban demikian:

“BPBD berusaha agar persediaan sarana dan prasarana harus cukup, biaya anggaran mengutamakan ketersediaan Sarana dan Prasarana termasuk bantuan untuk korban.”

Jawaban tersebut menyiratkan bahwa anggaran yang tersedia terbilang minim karena Aparat harus mengatur pengelolaan anggaran untuk diutamakan penyalurannya pada bantuan korban. Lebih lanjut Kepala Seksi Kedaruratan menyebut masalah pada fasilitas, beliau menjawab “Fasilitas biaya operasional bagi Aparat.”. Maka, anggaran yang tersedia BPBD alokasikan untuk keperluan penanganan bencana dan menyampingkan kepentingan akomodasi Aparat. Beliau juga mengatakan lebih lanjut:

“Anggaran BPBD mengalami penurunan atas kehendak Gubernur Jawa Barat yang menyebabkan kepala bidang dan kepala seksi kerap kali menggunakan uang pribadinya untuk biaya operasional.”

Kendala anggaran BPBD tidak menjadi halangan bagi aparat untuk melaksanakan tugas sekaligus program kerjanya, hal ini dibuktikan oleh penuturan Aparatur Kelurarahan Rancaekek Kencana mengenai fasilitas yang diberikan oleh BPBD kepada warga, berikut jawabannya:

“Dalam penanganan bencana banjir, BPBD menyediakan stok untuk balita dan ibu hamil yang disediakan di bidan desa dan puskesmas, berupa kit. Obat-obatan juga disediakan di puskesmas.”

Hal serupa juga diutarakan oleh Aparatur Desa Jelegong mengenai fasilitas yang diberikan oleh pihak BPBD, berikut penuturannya:

“Pendirian tenda pengungsian, bahan makanan dan sembako, bantuan material bangunan yang bersifat darurat seperti terpal (menutupi atap rumah yang terbawa angin), obat-obatan.”

Ketua RW 23 Desa Jelegong juga mengatakan hal sama tentang skala prioritas penyaluran anggaran untuk bantuan korban bencana, berikut jawabanya:

“Makanan, bahan bangunan asbes dan genteng. Tidak ada penanganan serius untuk banjir yang secara berulang terjadi.”

Pada pernyataan Ketua RW tersebut, beliau menyoroti tentang rendahnya atensi BPBD dalam penanganan bencana banjir di RW 23 Desa Jelegong yang secara repetitif jadi, hal tersebut mungkin dikarenakan banjir yang terjadi di RW 23 Jelegong tidak melebihi ketinggian di atas 1 meter, di mana warga secara mandiri melakukan evakuasi dan mengatasi banjir.

Pengadaan jalur evakuasi dan posko pengungsi juga termasuk sumber daya fasilitas yang disediakan oleh pihak BPBD. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Rancaekek mengatakan tidak ada ketersediaan jalur evakuasi di kecamatan, berikut penuturan beliau:

“Tidak ada jalur evakuasi, namun tempat evakuasi difokuskan di satu titik yakni di setiap kantor desa pada Kecamatan Rancaekek.”

Hal lain mengenai posko bencana juga mendapat tanggapan dari Aparatur Kelurahan Rancaekek Kencana sebagai berikut:

“Posko bencana tidak disediakan selama banjir karena warga tetap bertahan di rumah sendiri.”

Ketersediaan posko bencana banjir tidak disediakan karena bencana banjir yang sudah “biasa” warga hadapi setiap turun hujan. Namun, berbeda halnya dengan penyediaan posko pada bencana putting beliung, seperti yang Aparatur Desa Jelegong tanggapi, mengingat wilayah terdampak putting beliung terbesar adalah RW 23 Desa Jelegong. Berikut penuturan beliau:

“Posko pengungsian untuk bencana puting beliung di dirikan di Masjid RW 23 Desa Jelegong.”

Posko terpusat tersebut merupakan upaya BPBD dalam memberikan fasilitas terbaik bagi korban bencana, hal ini juga disetujui oleh Ketua RW 23 Desa Jelegong yang mengatakan:

“Penyediaan dapur umum, obat-obatan, pelayanan kesehatan (cek darah), makanan, juga sumbangan berupa uang yang dikasih oleh per individu”

Kendati demikian, BPBD tetap memberdayakan fasilitas untuk pelaksanaan program, selain fasilitas yang diberikan oleh pihak BPBD, sarana dan prasarana lain juga dikerahkan oleh instansi-instansi yang terlibat di mana sarana dan prasarana tersebut tidak mampu dipenuhi oleh BPBD, hal tersebut dilakukan guna mengoptimalkan kinerja penanganan bencana, Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bandung mengatakan:

“DISPERKIMTAN untuk teknis PUTR (seperti penyediaan bechoe dan alat berat), penampungan melihat perkembangan pasang surut air. TNI dan polri menyediakan tenda bagi pengungsi jika jumlahnya sudah masif. PMI menyediakan tenda sebagai pos kesehatan atau evakuasi korban luka ringan.”

Selain dari sejumlah instansi yang disebutkan di atas, koordinasi penyediaan fasilitas untuk penanganan bencana juga disediakan oleh pihak TNI dan Polisi, hal tersebut diberi tanggapan oleh Bhabinkamtibmas, berikut penuturannya:

“Tidak ada fasilitas yang disediakan dari pihak BPBD, polisi menggunakan sarana dan prasarana sendiri dari polres dan tim SAR Brimob.”

Hal serupa juga dikatakan oleh Bhabinsa setempat, berikut jawabannya:

“Pihak BPBD tidak memberikan sarana dan prasarana karena kami sudah memiliki alat atau fasilitas dalam penanganan bencana. BPBD hanya berfokus pada warga juga instansi pemerintahan.”

Kedua jawaban di atas menyebutkan bahwa BPBD tidak memfasilitasi kedua instansi tersebut dengan logistik tertentu, karena Polisi dan TNI memiliki logistik sendiri dalam melakukan penanganan bencana, di mana koordinasi yang mereka lakukan mampu menyumbangkan sarana dan prasarana lain bagi penanganan bencana.

1. Disposisi

Pelaksanaan suatu kebijakan yang efektif menuntut pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Disposisi ditentukan oleh tiga faktor yakni efek disposisi, pengaturan birokrasi dan insentif. Berikut pemaparan data selama penelitian mengenai disposisi.

1. Efek Disposisi

Efek disposisi merupakan sikap pelaksana yang menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan, bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh petinggi.

Pada pelaksanaan program penanganan darurat kebencanaan, Aparat dituntut untuk mampu meminimalisir resiko pada pelaksanaan program penanganan darurat kebencanaan, berikut pemaparan Kepala Seksi Kedaruratan mengenai hal tersebut:

“Resiko utama dalam penanganan bencana adalah potensi bencana susulan, maka pihak BPBD selalu koordinasi dengan BMKG. Pusdalops menerima informasi dari BMKG sebagai pusat informasi satu pintu.”

Sikap pelaksana dituntut untuk tidak memiliki celah kekurangan dalam penanganan bencana, maka hambatan-hambatan yang ada hanya disebabkan oleh faktor cuaca, koordinasi kembali dilaksanakan dalam meminimalisir potensi resiko maupun hambatan dalam program penanganan darurat kebencanaan yang melibatkan pemberdayaan instansi lain.

1. Pengaturan Birokrasi

Implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu pengaturan birokrasi juga bermuara pada “pembentukan” sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personal.

Pembentukan sistem penanganan bencana yang optimal ditentukan oleh pengaturan birokrasi dengan instansi yang terlibat yakni kepala daerah setempat seperti kecamatan, desa dan kelurahan, sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Seksi Kedaruratan berikut:

“Koordinasi dengan kecamatan yang terkena bencana dilakukan melalui media sosial juga informasi dari Pusdalops. Adapula koordinasi peningkatan status bencana menjadi siaga tanggap darurat dilakukan dengan Sekretaris Daerah. Koordinasi melalui rapat dengan meninjau kondisi untuk penaikan status siaga bencana.”

Peningkatan status bencana juga dibicarakan oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Rancaekek berikut:

“Kecamatan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menaikkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat, konteks yang diubah adalah prosedur pendataan bencana untuk mendatangkan pihak pemerintah (BPBD Kab) dihapuskan. Pada taraf tanggap darurat, pihak BPBD langsung hadir ke lokasi bencana saat informasi masuk, tanpa harus melakukan pendataan terlebih dahulu sehingga dapat meminimalisir dampak bencana.”

Pemberdayaan birokrasi sebagaimana pemaparan Kepala Seksi Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Rancaekek di atas mampu meningkatkan kinerja Aparatur dan efektivitas program.

1. Insentif

Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai usaha memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Motivasi merupakan bentuk insentif yang dikerahkan oleh pemimpin pelaksana pada tim pelaksana, berikut pemaparan Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bandung mengenai hal tersebut:

“Aparat selalu sigap dalam menghadapi bencana. Saat apel dan turun ke lapangan, petugas selalu bersemangat.”

Pernyataan tersebut membuktikan Aparatur pelaksana program penanganan bencana sudah siap dalam menerima segala konsekuensi resiko dalam pelaksanaan tugasnya. Pemimpin atau kepala pelaksana tidak perlu memberikan kiat-kiat untuk membangun semangat Aparatur pelaksana, karena apa yang Aparatur laksanakan murni atas dasar kemanusiaan.

Beberapa upaya juga dikerahkan pada Aparatur untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanganan bencana, berikut penututan Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bandung:

“Anggaran diutamakan untuk keperluan korban juga sarana dan prasarana di lokasi bencana. Koordinasi yang matang dengan seluruh elemen yang terlibat, kesiapsiagaan petugas dan aparat dalam menghalau bencana.”

Selain motivasi, alokasi anggaran serta koordinasi menyeluruh merupakan bentuk insentif yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Bandung dalam melaksanakan program penanganan darurat kebencanaan.

1. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan kordinasi dengan baik serta memperhatikan pelaksanaan SOP dan fragmentasi.

1. Pelaksanaan SOP

Membuat *standard operating prosedures* (SOPs) yang lebih fleksibel, SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Pelaksanaan SOP pada BPBD sesuai dengan orientasi bencana yang terjadi. Selain prosedur penanganan kebencanaan, tata kelola arsip juga merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan SOP, berikut pemaparan Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bandung mengenai hal tersebut:

“Arsip dikelola oleh bagian PUSDALOPS dan kebidangan masing-masing.”

Pelaksanaan SOP program penanganan darurat kebencanaan juga melibatkan pihak eksternal seperti kepala daerah yang terkena bencana, bagaimana kepala daerah mampu mengabarkan BPBD agar proses penanganan bencana dapat dilaksanakan secara tanggap, efektif dan efisien, berikut penuturan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Rancaekek mengenai hal tersebut:

“Dilakukan melalui media sosial (whatsapp) yang didukung dengan data formal setelahnya.”

Hal serupa juga dilakukan oleh Aparatur tingkat desa dan kelurahan, berikut tanggapan Aparatur Desa Jelegong mengenai hal tersebut:

“Survey ke tempat bencana juga pendataan korban, kerusakan bangunan, evakuasi korban luka ke rumah sakit dan puskesmas dengan koordinasi dengan RT dan RW.”

Maka, pelaksanaan SOP tidak hanya terpaku pada internal instansi, namun melibatkan juga pihak eksternal yang terlibat dalam pelaksanaan program penanganan darurat kebencanaan.

1. Fragmentasi

Tujuan pelaksanaan fragmentasi yakni untuk menyebar tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur biroktasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan organisasi yang kompeten dan kapabel.

Fragmentasi pada BPBD disesuaikan dengan orientasi tugas pada penanganan bencana, berikut jawaban Kepala Seksi Logistik BPBD Kabupaten Bandung:

“Penanganan dibagi 3 fase pra, bencana dan pasca yang ditugaskan pada ketiga bidang. Untuk penanganan secara terstruktur untuk meminimalisir tingkat korban bencana.”

Pembagian tugas berdasarkan ketiga fase tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bandung, berikut penuturannya:

“Pusdalops sebagai penerima informasi diteruskan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik. Kedaruratan datang untuk langsung melakukan pendataan di lokasi bencana, data diproses oleh Bidang Kesiapsiagaan dan Logistik yang langsung mendatangi lokasi untuk pemenuhan kebutuhan korban dan kegiatan evakuasi.”

Penjelasan di atas merupakan fragmentasi struktur birokrasi dalam penanganan bencana. Fragmentasi juga dilakukan pada saat terjadinya bencana dengan pihak terlibat seperti Polisi dan TNI. Berikut tanggapan Bhabinkamtibmas setempat mengenai hal tersebut:

“Apel diadakan di posko saat akan melakukan rekonstruksi terpusat di posko bencana bersama dengan instansi lain, koordinasi hanya berlangsung di posko untuk kepentingan distribusi bantuan dan pembagian tugas untuk rekonstruksi.”

Pembagian tugas juga melibatkan TNI yang membantu dalam proses penanganan bencana, berikut penuturan Bhabinsa setempat:

“Pembagian tugas di koordinasikan saat Apel dekat posko bencana, kita bantu membangun ulang rumah-rumah yang rusak juga mendistribusikan bantuan kepada warga setempat berdasarkan tingkat urgensi nya.”

Fragmentasi guna pembagian tugas yang dilakukan didalam instansi dan diluar instansi mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi program penanganan darurat kebencanaan, agar dampak bencana serta korban mampu di minimalisir.

* + 1. **Hambatan dan Upaya**

Hambatan atau kendala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990 : 235), menjelaskan yang dimaksud dengan penghambat adalah hal yang menjadi penyebab atau karena hanya tujuan atau keinginan tidak dapat diwujudkan. Jadi, penghambat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor-faktor tertentu yang menghambat Implementasi Kebijakan Program Penanganan Darurat Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Upaya adalah kegiatan dengan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (perbuatan ,prakarsa, ikhtihar daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Pada penelitian ini, upaya merupakan usaha yang dikerahkan oleh BPBD maupun instansi lain yang terlibat dalam melaksanakan Program Penanganan Darurat Kebencanaan sebagai salah satu bentuk tugas kemanusiaan.

1. Hambatan

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pencanpaian target kinerja BPBD antara lain:

1. Belum adanya kesesuaian payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan salah satu kegiatan dalam hal ini mengenai penyaluran bantuan sosial dalam bentuk barang material untuk korban pasca bencana yaitu keterlambatan terbitnya Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat Akibat Bencana Alam yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung, sehingga pelaksanaan penyaluran bantuan yang dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama, menjadi terhambat.
2. Keterlambatan anggaran pada saat tanggap darurat menyebabkan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana terhambat dan berakibat pada kurang optimalnya pelayanan kepada korban bencana.

Selain faktor-faktor tersebut di atas, kendala dalam pelaksanaan program Penanganan Darurat Kebencanaan juga dikemukakan oleh informan wawancara pada penelitian ini, seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bandung, berikut penuturannya:

“Kendala utama adalah cuaca (secara teknis), tetapi koordinasi yang telah dialakukan sebelumnya, (cuaca) tidak menjadi hambatan. Anggaran BPBD mengalami penurunan atas kehendak Gubernur Jawa Barat yang menyebabkan kepala bidang dan kepala seksi kerap kali menggunakan uang pribadinya untuk biaya operasional.”

Anggaran selalu menjadi momok utama pada sebuah organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Terutama pada program penanganan darurat kebencanaan, anggaran yang dikeluarkan untuk bantuan pada korban tidak dapat ditetapkan karena potensi dampak bencana serta korban yang tidak dapat diprediksi. Kendala lainnya dikemukakan oleh Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung, berikut penuturannya:

“Sosialisasi bencana dilaksanakan pada hari kerja, salah satu faktor tidak semua warga bisa menghadiri. Kecuali jika mendesak atau desa yang mengadakan sosialisasi dengan waktu yang diluar jam kerja. BPBD tidak dilibatkan pada proses pemerolehan Amdal dan KLHS.”

Sosialisasi bencana merupakan hal penting guna mempersiapkan warga dalam menghadapi bencana yang tidak dapat diprediksi, informasi mengenai kebencanaan yang disampaikan dalam sosialisasi harus disampaikan kepada seluruh warga terutama instansi yang memiliki peran besar seperti kecamatan, kelurahan dan desa. Selain perihal sosialisasi, Kepala Seksi Kesiapsiagaan Kabupaten Bandung juga mengemukakan masalah tentanag BPBD yang tidak dilibatkan dalam proses pemerolehan amdal dan KLHS yang diperlukan untuk pembangunan. Potensi bencana juga harus diperhatikan dalam pembangunan baik berupa infrastruktur untuk umum, perusahaan swasta dan pengembang perumahan. Pembangunan yang absen dalam mempertimbangkan potensi bencana akan menimbulkan efek yang serius di masa yang akan datang. Untuk itu, pelibatan BPBD dalam proses pemerolehan amdal dan KLHS harus ditindak serius.

Aparatur Desa Jelegong juga mengungkapan kendala yang dihadapi dalam proses penanganan bencana, berikut penuturannya:

“Masih adanya keterlambatan dalam proses penanganan dari pihak BPBD juga kendala lain karena banjir juga ketika kejadian puting beliung dan banyaknya masyarakat yang datang menonton membuat kemacetan.”

Keterlambatan Aparatur BPBD dalam menangani bencana putting beliung di Desa Jelegong disebabkan oleh cuaca yang sebelumnya dikatakan oleh Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bandung. Keterlambatan Aparatur juga mungkin bisa disebabkan karena minimnya biaya operasional Aparat, Kepala Seksi Kedaruratan juga pernah mengatakan bahwa BPBD lebih mengutamakan penyaluran anggaran untuk direalisasikan dalam bantuan terhadap korban dampak bencana dibandingkan dengan untuk kepentingan Aparat. Pihak Aparatur desa juga menambahkan karena banjir menggenangi Desa Jelegong penanganan menjadi lebih lamban, serta kepadatan masyarakat yang hanya datang untuk “menonton” menghambat proses penanganan bencana.

Ketua RW 23 Desa Jelegong juga memberikan tanggapan terhadap kendala selama proses penanganan bencana berlangsung, berikut penuturannya:

“Tidak ada penyuluhan dan simulasi bencana selepas puting

beliung yang pernah terjadi. Pemerintah tidak mengulurkan bantuan (secara formal), hanya secara individu.”

Minimnya informasi mengenai simulasi bencana menyebabkan kegagapan masyarakat terhadap potensi bencana dan cara menghadapinya, kegagalan penyampaian informasi pada sosialisasi bencana yang tidak dilaksanakan mampu menumbuhkan angka korban bencana yang lebih banyak karena masyarakat hanya berbekal pengetahuan masing-masing dan gerak reflek mereka. Bahasan kedua mengenai pemerintah yang tidak menyalurkan bantuan pada masyarakat secara formal, pemerintah yang dimaksud pada pernyataan tersebut bukanlah BPBD, karena BPBD tidak pernah luput dalam memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana.

Berbicara tentang bantuan, kendala lain mengenai hal tersebut juga disampaikan oleh Warga RW 23 Desa Jelegong, berikut penuturannya:

“Pembagian makanan mentah dan uang tidak merata, bantuan tsb diberikan kepada RT dan RW untuk didistribusikan pada Warga, tapi bantuan tidak merata dibagikan.”

Meskipun hal tersebut diluar wewenang BPBD karena BPBD sudah menuntaskan kewajibannya dalam memberikan bantuan, distribusi bantuan yang mengalami masalah merupakan dampak dari kurangnya koordinasi antara pihak warga dan instansi lain yang terlibat. Posko terpusat merupakan upaya BPBD dalam melaksanakan penanganan yang lebih cepat dan efisien, namun hal tersebut juga menimbulkan kekurangan seperti distibusi bantuan yang tidak merata. Daerah yang terletak jauh dari posko bencana tersebut memiliki kemungkinan mendapatkan bantuan yang lebih sedikit daripada rumah-rumah dengan jarak yang berdekatan dari posko penampungan bencana.

Hal serupa mengenai distribusi bantuan yang tidak merata juga dikatakan oleh pihak Bhabinkamtibmas sebagai berikut:

“Kendala hanya ada satu posko bencana yang menyebabkan cemburu sosial pada RW lain diluar desa jelegong karena bantuan terpusat hanya pada posko yang terdapat di RW 23 desa jelegong. Penyebab kurang koordinasi karena pada hari H kejadian tidak ada koordinasi menyeluruh namun per masing-masing tim. BPBD tidak turun dalam penanganan banjir, ketinggian tidak lebih dari 1 meter.”

BPBD tidak melakukan penanganan serius saat terjadi bencana banjir dikarenakan pihak BPBD telah memberikan bantuan berupa stok *family kit* yang disimpan di puskesmas kecamatan. Selain itu, banjir dengan ketinggian dibawah 1 meter tidak menimbulkan dampak serius karena warga sudah mampu mengantisipasi dan mengevakuasi diri mereka masing-masing saat banjir terjadi.

Pihak pemuda juga memberikan tanggapan mengenai penanganan bencana banjir, berikut penuturannya:

“Karna jika terjadi banjir di rancaekek membuat macet dimana mana, sangat menghambat aktivitas masyarakat. tata kelola pembangunan perumahan maupun pembangunan lainnya, karena melihat sekarang terasa gampang sebuah development mendapat acc membangun perumahan dalam pembebasaan lahan juga tidak diiringi pembangunan ruang terbuka hijau untuk resapan air”

Pernyataan yang disampaikan oleh Pemudi tersebut menggambarkan keresahan serupa yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung yang sudah dijabarkan di atas.

Berdasarkan pemaparan di atas, kendala yang dirasakan oleh informan-informan pada penelitian ini adalah:

* + - 1. Anggaran yang minim sehingga kebutuhan Aparatur seperti biaya operasional harus ditekan sehingga penyaluran bantuan pada korban bencana optimal.
      2. Cuaca yang menghambat proses penanganan bencana.
      3. Penyaluran bantuan yang tidak merata terhadap korban terdampak bencana.
      4. Sosialisasi bencana yang terhenti sampai tahap kecamatan dan desa, informasi tidak disampaikan kembali kepada masyarakat umum.
      5. Proses perizinan bangunan yang memerlukan KLHS dan Amdal tidak melibatkan BPBD untuk mengetahui potensi bencana pada daerah tersebut.
  1. Upaya

Strategi pemecahan masalah yang ditempuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2016 yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan kebencanaan. Untuk dasar hukum pada kegiatan-kegiatan kebencanaan agar melakukan Peningkatan koordinasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana daerah dengan membangun kerangka regulasi yang jelas. Sedangkan untuk mengatasi keterlambatan anggaran tanggap darurat , BPBD terus berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Kedepan juga perlu dilaksanakan upaya-upaya yang lebih baik lagi dengan melakukan evaluasi dari penetapan skala prioritas kegiatan Badan.

Prioritas pembangunan SKPD BPBD Kabupaten Bandung diarahkan pada beberapa hal yang dianggap merupakan isu strategis daerah khususnya dibidang penaggulangan bencana sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam pengananganan segera. Hal tersebut antara lain :

1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM pelayanan publik dibidang Penanggulangan Bencana.
2. Optimalisasi Pagu Anggaran Sektoral BPBD yang rasional dan proporsional
3. Peningkatan kualitas/kuantitas Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
4. Peningkatan kualitas Sistem Manajemen PRB yg didukung oleh RAD, PRB dan Rencana Kontijensi
5. Pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah, jenis bencana dan dampak bencana
6. Peningkatan kualitas koordinasi dan pelaksanaan program/kegiatan baik lintas lembaga/intansi/SKPD, lintas program/kegiatan maupun Anggaran
7. Terbitnya regulasi/kebijakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang SPM/SOP siklus penanggulangan kebencanaan (pra, saat dan pasca bencana).
8. Terdapatnya Kajian yang Komprehensif terhadap gambaran secara menyeluruhterhadap resiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah/Kabupaten Bandung dalam bentuk tertulis dan Peta
9. Peningkatan Kualitas Sistem Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Bandung.
10. Kemandiirian dan peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha didalam upaya pencegahan/ kesiapsiagaan (Pra bencana) serta adaptasi terhadap bencana

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

* 1. **Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yakni mengenai implementasi kebijakan program penanganan darurat kebencanaan, serta hambatan dan upaya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, berikut pemaparannya.

1. Implementasi Kebijakan Program

Berdasarkan teori Edward III yang diterapkan pada penelitian ini, implementasi kebijakan program penanganan darurat kebencanaan terdapat empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Variabel komunikasi dinilai berdasarkan transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi pesan pada implementasi kebijakan program meliputi koordinasi internal dan eksternal serta sosialisasi bencana yang dilaksanakan oleh Aparat kepada masyarakat. Pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sudah berjalan dengan baik, struktur transmisi pesan antara komunikator dan komunikan berhasil karena munculnya koordinasi yang baik antara Aparatur BPBD Kabupaten Bandung maupun dengan instansi lain yang terlibat dalam penanganan bencana melalui komando terpusat. Sosialisasi bencana yang terlaksana juga merupakan bentuk kesuksesan transmisi pesan atau informasi yang dilakukan oleh pihak BPBD. Faktor kedua penentu komunikasi adalah kejelasan, kejelasan informasi maupun pesan pada pengarahan yang dilaksanakan oleh kepala pelaksana program terhadap Aparat, serta sosialisasi bencana. Kejelasan komunikasi telah berhasil dilaksanakan karena pengarahan yang diberikan pada aparat mampu mengoptimalkan pelaksanaan program, kejelasan pada sosialisasi bencana pun dinilai sukses karena mampu menumbuhkan kesiapan warga serta aparat tingkat kecamatan, desa dan kelurahan. Konsistensi pada komunikasi meliputi tindakan penanganan pada saat bencana, keberhasilan konsistensi komunikasi dinilai dari ketanggapan BPBD dalam melakukan penanganan bencana.

Variabel sumber daya ditentukan oleh faktor staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Staf dipengaruhi oleh pelatihan pada tim pelaksana yang turun ke lapangan saat bencana yang sudah dilaksanakan, artinya staf BPBD terdiri dari sumber daya manusia yang sudah terlatih. Informasi meliputi teknis pada pelatihan, faktor ini dinilai berhasil karena tindakan tim pelaksana di lapangan mendapat respon yang baik dari masyarakat, kelengkapan informasi BPBD berupa dokumen juga ditampilkan pada situs daring milik Kabupaten Bandung. Wewenang meliputi koordinasi dan kerjasama antar instansi telah mencapai keberhasilan. Fasilitas yang memadai yang dimiliki oleh BPBD dinilai baik karena korban terdampak bencana tidak mengeluhkan perihal bantuan dan upaya evakuasi yang dilaksanakan oleh BPBD.

Variabel disposisi ditentukan oleh faktor efek disposisi, pengaturan birokrasi dan insentif. Efek disposisi berupa upaya yang dilakukan BPBD dalam meminimalisir resiko dalam penanganan bencana yang telah terlaksana dengan baik. Pengaturan birokrasi terwujud dalam koordinasi dengan pemimpin daerah setempat yang sudah berhasil dilakukan dengan baik. Insentif terlaksana dengan baik karena tugas BPBD merupakan tugas kemanusiaan.

Variabel struktur birokrasi ditentukan oleh faktor SOP dan fragmentasi. Pelaksanaan SOP sudah berhasil karena penanganan tim pelaksana berorientasi pada bencana yang terjadi. Fragmentasi pun sudah berhasil karena pembagian berdasarkan penanganan pra-bencana, bencana dan pasca bencana.

1. Hambatan

Kendala meliputi anggaran yang minim sehingga kebutuhan Aparatur seperti biaya operasional harus ditekan sehingga penyaluran bantuan pada korban bencana optimal, cuaca yang menghambat proses penanganan bencana, penyaluran bantuan yang tidak merata terhadap korban terdampak bencana, sosialisasi bencana yang terhenti sampai tahap kecamatan dan desa, informasi tidak disampaikan kembali kepada masyarakat umum, proses perizinan bangunan yang memerlukan KLHS dan Amdal tidak melibatkan BPBD untuk mengetahui potensi bencana pada daerah tersebut.

1. Upaya

Peningkatan status siaga darurat menjadi tanggap darurat, yakni pihak kecamatan tidak perlu memberikan data formal saat terjadi bencana kepada pihak Seksi Kedaruratan BPBD untuk *assessment*, BPBD dapat langsung turun ke lokasi bencana sebagai upaya meminimalisir dampak bencana baik berupa kerusakan maupun jumlah korban. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan publik dibidang Penanggulangan Bencana, peningkatan kualitas/kuantitas Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana, pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah, jenis bencana dan dampak bencana, peningkatan kualitas koordinasi dan pelaksanaan program/kegiatan baik lintas lembaga/intansi/SKPD, peningkatan kualitas Sistem Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Bandung.

* 1. **Saran**
     1. **Saran Akademis**

Perlu adanya penelitian lanjutan, penelitian ini masih didasarkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan pengamatan yang terbatas waktunya sehingga masih terdapat kelemahan. dianjurkan untuk melihat implementasi secara lebih komprehensif dan teliti mengenai pelaksanaan penanganan darurat kebencanaan.

* + 1. **Saran Praktis**
       1. Pelatihan teknis darurat kebencanaan melibatkan delegasi dari kecamatan, desa dan kelurahan untuk penanganan pertama yang dekat dengan lokasi bencana.
       2. Sosialisasi mengenai bencana sampai ke tingkat warga.
       3. Penyediaan posko bencana di setiap titik daerah terdampak bencana untuk pemerataan distribusi bantuan.
       4. Meningkatkan koordinasi dengan pihak lain berbasis non-lembaga.
       5. Meningkatkan koordinasi dengan BMKG untuk meminimalisir hambatan berupa cuaca.